

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN



Tahun Anggaran

2021



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja disusun sesuai amanat: i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; iv) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan v) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.

Laporan Kinerja dapat berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Ucapan terimakasih

disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban kinerja, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi media untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sudiro Roi Santoso

NIP. 196904162001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
1. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan.....	3
2. Bagian Kepegawaian dan Umum	3
3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	4
D. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Uraian Singkat Renstra	7
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
C. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.....	9
D. Perjanjian Kinerja	10
E. Metode Pengukuran	17
F. Target Tahun 2021 menurut Renstra	17
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	22
A. Sumber Daya Manusia	23
B. Sarana dan Prasarana	32
C. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)	41
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	43
A. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	43
B. Perbandingan Kinerja Organisasi	52
C. Realisasi Anggaran	54
D. Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	67

E. Efektifitas dan Efisiensi.....	68
F. Prestasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	73
BAB V PENUTUP	78
A. Permasalahan	78
B. Tindak Lanjut.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	viii
Tabel 2	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Menurut Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	20
Tabel 3	Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	23
Tabel 4	Rekap Pendidikan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	24
Tabel 5	Rekapitulasi Gender Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	24
Tabel 6	Rekapitulasi Usia Pegawai Berdasarkan Pendidikan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	25
Tabel 7	Rekapitulasi Gender PNS Berdasarkan Golongan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	26
Tabel 8	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	26
Tabel 9	Rekapitulasi Jabatan Fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	27
Tabel 10	Subkoordinator Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	27
Tabel 11	Jabatan Fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.....	28
Tabel 12	Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	30
Tabel 13	Daftar Konsultan Individual Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	32
Tabel 14	Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 1	33
Tabel 15	Rekap Daftar Barang Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 Wing 1.....	35
Tabel 16	Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 2	35
Tabel 17	Rekap Daftar Barang Ruang Rapat Lantai 2 Wing 2	37
Tabel 18	Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 3.....	37

Tabel 19	Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3	40
Tabel 20	Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3	40
Tabel 21	Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 Sesuai Cascading Renstra DJPI Tahun Anggaran 2020-2024	46
Tabel 22	Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrukturn Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	51
Tabel 23	Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan....	56
Tabel 24	Realisasi Anggaran Per-Komponen Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021	57
Tabel 25	Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021	60
Tabel 26	Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	68
Tabel 27	Perbandingan Jumlah Sub Komponen yang Tercantum dalam Dokumen DIPA Awal dengan DIPA Revisi 1	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	5
Gambar 2	<i>Cascading</i> Program dan Kegiatan DJPI TA. 2020 – 2024	9
Gambar 3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 Awal Tahun 2021	11
Gambar 4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 Revisi ke-1	12
Gambar 5	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 Revisi ke-2	14
Gambar 6	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 Revisi ke-3	15
Gambar 7	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 Revisi ke-4	17
Gambar 8	Grafik Gender Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	24
Gambar 9	Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik serta Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Lantai 2 Wing 1	34
Gambar 10	Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lantai 2 Wing 1	35
Gambar 11	Ruang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 2	36
Gambar 12	Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lantai 2 Wing 2	37
Gambar 13	Ruang Bagian Kepegawaian dan Umum, Lantai 2 Wing 3	39
Gambar 14	Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3	40
Gambar 15	Ruang Rapat 2, Lantai 2 Wing 3	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun atas target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dimana secara keseluruhan terdapat 6 (enam) indikator kinerja kegiatan dan 21 (duapuluh satu) Output Kegiatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan PK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 sebagai pernyataan kesepakatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang tahun 2021. Pencapaian kinerja Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:

Tabel 1
Target Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	63,35	63,35
SK. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15
IKK Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	10
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	10

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Target (%)	Realisasi (%)
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10	10

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 dilakukan dengan cara perbandingan antara target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program yang diperjanjikan di dalam PK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 dengan realisasinya. Dimana sesuai yang tercantum dalam table di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar 63,35% dari target sebesar 63,35% sehingga pada IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR kinerjanya mencapai 100%

Strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi hambatan pencapaian target 2021 yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Koordinasi internal dan eksternal sesuai prinsip manajemen yang baik dan memenuhi good governance;
2. Pemetaan kebutuhan SDM baik ASN dan Non ASN, untuk mengisi dan mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar bisa berjalan dengan optimal.
3. Koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pengelolaan, hingga ke tahap evaluasi anggaran yang tertib dan akuntabel;
4. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dalam menjalankan reformasi birokrasi yang dapat menghasilkan perbaikan kinerja organisasi;
5. Melakukan mitigasi resiko/ tindakan antisipasi bila terjadi sesuatu hal yang dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda seperti terjadinya bencana alam, perubahan organisasi, dan masih berlanjutnya kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang

berdampak juga kepada penilaian hasil capaian kinerja;

6. Meningkatkan keterlibatan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dalam penyusunan perjanjian KPBU dan peningkatan pemahaman terkait tugas DJPI dalam KPBU.

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada awal tahun 2021, total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sejumlah Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), terdapat 5 (lima) kali perubahan pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2021 dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 8 tanggal 2 November 2021 yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu dari Direktorat PPISDA yang dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI dengan pagu anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran sebagai hasil pengelolaan DIPA yang dialokasikan pada TA. 2020. Rencana penyerapan anggaran dan rencana fisik pada TA. 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan di awal tahun sebesar 100%, Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan *ie-Monitoring online* (sampai dengan tanggal 10 Januari 2022) yaitu sebesar 94,25% dengan realisasi capaian fisik sebesar 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis DJPI, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) melaksanakan tugas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang integratif, transparan dan akuntabel, serta melaksanakan peningkatan layanan administrasi yang prima dan penyediaan informasi yang akurat dan andal melalui peningkatan kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada DJPI atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan penyampaian gambaran permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi masukan dalam melakukan evaluasi untuk menjadi masukan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

B. Tugas Dan Fungsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bagian Ketiga yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Pasal 528 tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

“Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal”

Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 529 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 528 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan

- k. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memerlukan manajemen struktur organisasi yang kuat dan saling mendukung sehingga pendistribusian tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1) Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;

Tugas: melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal

Susunan organisasi Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagian Kepegawaian dan Umum;

Tugas: melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

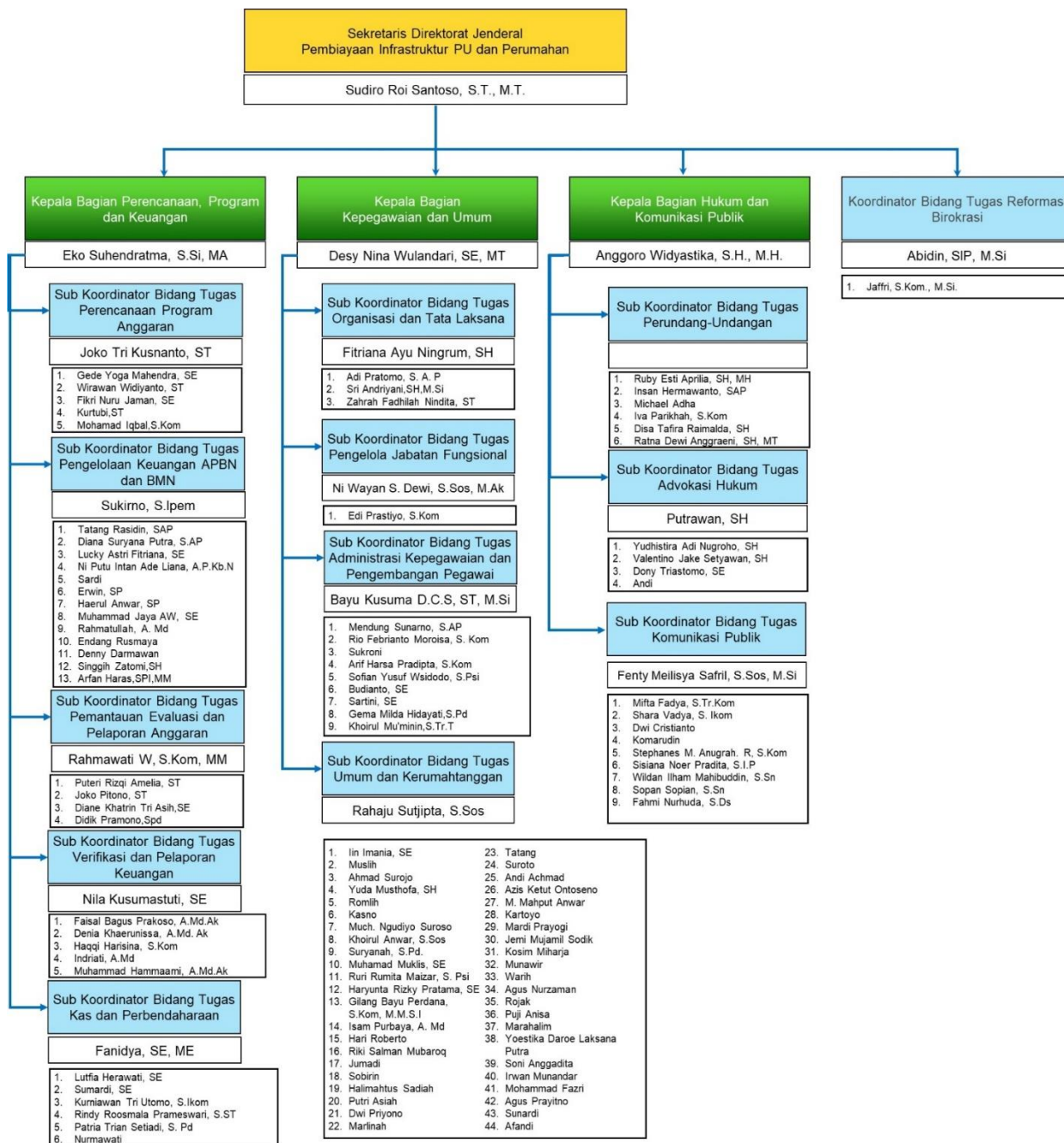
Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pembiayaan, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan Perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021



Keterangan:

Untuk Jabatan Sub Koordinator Bidang Tugas Perundang-Undangan masih kosong karena belum ada pengangkatan dan sebagai penanggung jawab sementara dijabat oleh Ruby Esti Aprilia, SH, MH sebagai Ketua Tim Pelaksana Tugas Bidang Tugas Perundang-Undangan

D. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun 2021 dengan mengingat isu strategis yang ada, dimana isu tersebut menjadi tantangan yang harus dapat diatasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik, berhasil dan berdaya guna. Adapun isu strategis di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sebagai berikut:

1. Melalui pemetaan kebutuhan pegawai serta fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional agar dapat memenuhi tuntutan tugas dan fungsi struktural yang melekat;
2. Penetapan *road map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian PUPR;
3. Likuidasi BLU PPDPP di tahun 2021 membutuhkan pengawalan dalam prosesnya dan pendampingan untuk pengalihan BMN hingga personil dari BLU PPDPP ke Kementerian PUPR;
4. Sesuai dengan Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DJPI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan keterlibatan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dalam penyusunan perjanjian KPBU dan peningkatan pemahaman terkait tugas DJPI dalam KPBU;
5. Penambahan alokasi anggaran untuk mengakomodir kebutuhan antara lain:
 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pengadaan separator, akrilik ruangan, meja, lemari besi dan meubelair CPNS;
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI berupa pengadaan komputer untuk CPNS sebanyak 26 unit dan PNS sebanyak 5 unit;
 - Alokasi Anggaran untuk Renovasi Gedung A1 Lantai 3;
 - Pengadaan *Barrier Gate* dan peralatan lain terkait renovasi Area Parkir;
 - Alokasi Anggaran untuk memfasilitasi perjalanan dinas Bapak Dirjen ke Turki dan delegasi DJPI dalam Word Dubai Expo 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Uraian Singkat Renstra

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu Unit Eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjabarkan kebijakan dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan Kementerian PUPR, sehingga Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Negara.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan tujuan Unit Organisasi Tahun 2020-2024, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Adapun Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan tujuan Unit Kerja Tahun 2020-2024, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR yang kelima (SS5), yaitu: “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”.

Sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya” kemudian dijabarkan kedalam “Sasaran Program Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” dan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) pada Tahun 2020-2024 akan mengampu 2 program yaitu (1) Program Dukungan Manajemen (Koordinator: Sekretariat Jenderal); dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator: Ditjen Cipta Karya). Dua Program tersebut merupakan program yang digunakan DJPI dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut di-*breakdown* menjadi Sasaran Program. Sasaran Program (SP) DJPI yaitu:

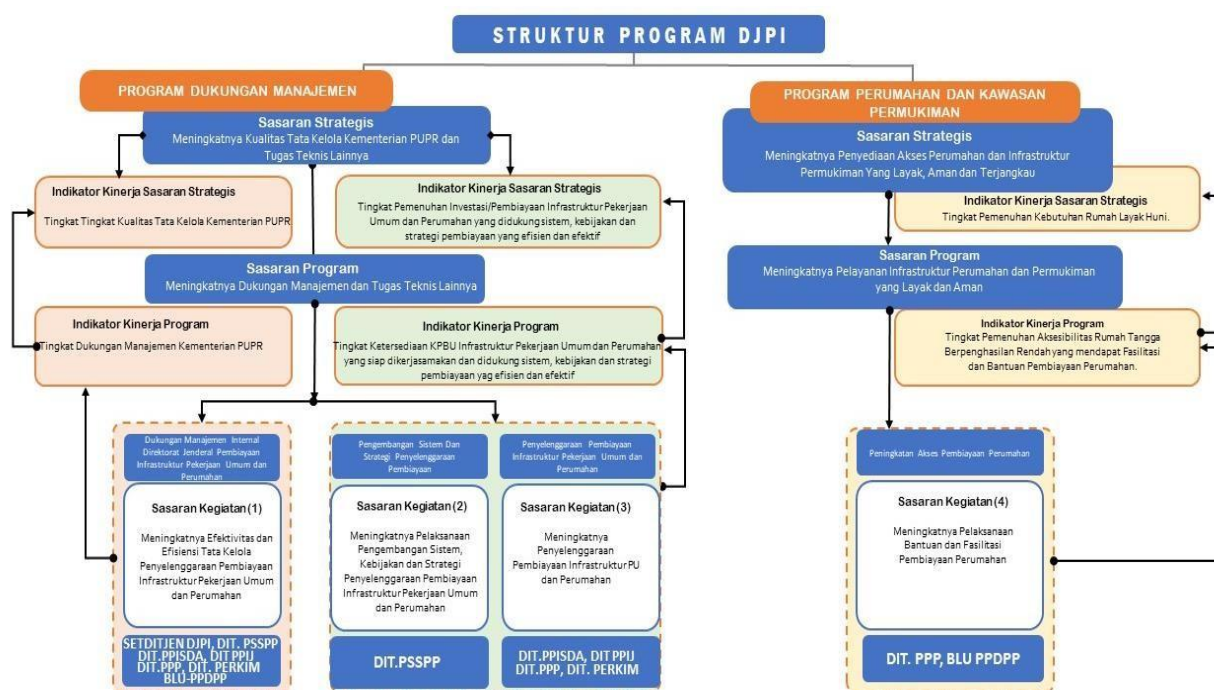
- 1) Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja Program terdiri dari dua indikator yaitu:

- Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR), diampu oleh Sekretariat DJPI, BLU PPDPP dan Direktorat di lingkungan DJPI;
 - Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan.
- 2) Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman.

Indikator Kinerja Program tersebut mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Gambar 2
Cascading Program dan Kegiatan DJPI TA. 2020 – 2024



C. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Berdasarkan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri dan berkepribadian, maka berdasarkan hal tersebut kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembiayaan Perumahan melalui:
 - a. Penataan regulasi dan kebijakan;
 - b. Pelayanan bantuan hukum;
 - c. Peningkatan dukungan, tata laksana dan koordinasi kelembagaan;
 - d. Peningkatan pengelolaan anggaran;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM serta pemberdayaan pemangku kepentingan;
 - f. Pengembangan pengelolaan aset (property management).

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, untuk menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki strategi mengimplementasikan reformasi birokrasi perencanaan dan penganggaran serta reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

D. Perjanjian Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 sebagai berikut:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama tahun 2021 menyusun perjanjian kinerja (PK) sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pertama**, PK awal pada bulan Januari 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun berdasarkan DIPA awal yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah). Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 3

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021
Awal Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama

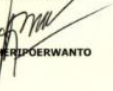


IRMA YANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KEGIATAN
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



EKO D. HERIPOERWANTO

ANGGARAN
Rp62.094.305.000,00

JAKARTA, JANUARI 2021

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



IRMA YANTI

2. **Kedua**, PK revisi pertama pada bulan Februari 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 1 pada Revisi DIPA 1 tanggal 18 Februari 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 61.967.862.000,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi yang Pertama yaitu sebagai berikut:

Gambar 4

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021
Revisi ke-1

REVISI	
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Irma Yanti
Jabatan	: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Eko D. Heripoerwanto
Jabatan	: Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua  EKO D. HERIPOERWANTO	Jakarta, Februari 2021 Pihak Pertama  IRMA YANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021		
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
JKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50%	13,50%
JKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
JKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
JKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
JKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,25%	15%
JKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp56.967.862.000,00

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN EKO D. HERIPOERWANTO	JAKARTA, FEBRUARI 2021 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN IRMA YANTI
---	--

3. **Ketiga**, PK revisi kedua pada bulan Juli 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya 2(dua) kali revisi DIPA di bulan Juli yaitu Revisi DIPA 3 tanggal 3 Juli 2021 yang disebabkan karena adanya Penambahan Gaji dan Tunjangan dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Pagu Anggaran sebesar Rp72.567.862.000,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Revisi DIPA 4 tanggal 28 Juli 2021 yang disebabkan karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 3 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp72.426.622.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi ketiga adalah sebagai berikut:

Gambar 5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021
Revisi ke-2



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2021

Pihak Kedua



Eko D. Heripoerwanto

Pihak Pertama



Irma Yanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN			REVISI
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET	
(1)	(2)	(3)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%	
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50%	15%	
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%	
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%	
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%	
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,25%	15%	
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%	
KEGIATAN Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		ANGGARAN Rp72.426.622.000,00	
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  EKO D. HERIPOERWANTO		SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  IRMA YANTI	
JAKARTA, JULI 2021			

4. **Keempat**, PK revisi ketiga pada bulan Agustus 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya :
- Pergantian Pejabat Eselon 1 dan 2 di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu :
 - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto MCP. ke Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna S.E., M.T.
 - Sekretaris Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Ir. Irma Yanti, MT. ke Sudiro Roi Santoso S.T., M.T.
 - *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 4 pada Revisi DIPA 5 tanggal 20 Agustus 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp70.177.235.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi ketiga adalah sebagai berikut:

Gambar 6

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021
Revisi ke-3

REVISI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

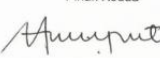
Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama


SUDIRO ROI SANTOSO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
JKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,25%	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

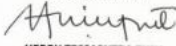
KEGIATAN

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp70.177.235.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

JAKARTA, AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN


SUDIRO ROI SANTOSO

5. **Keempat**, PK revisi keempat pada bulan November 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya penambahan pagu dari Direktorat PPISDA yang dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI pada Revisi DIPA 8 tanggal 2 November 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Format Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi ketiga adalah sebagai berikut:

Gambar 7

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021
Revisi ke-4

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, November 2021
Pihak Pertama



SUDIRO ROI SANTOSO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,25%	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

KEGIATAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN
Rp71.341.555.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



SUDIRO ROI SANTOSO

Catatan:

Dokumen Perjanjian Kinerja tertera dalam **Lampiran 1** pada Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

E. Metode Pengukuran

Pengukuran yaitu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 di Tahun Anggaran 2021, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
6. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik

F. Target Tahun 2021 Menurut Renstra

1. Target Kinerja

Sesuai dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mendukung program-program yang ada di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akan dilaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Output Kegiatan (Rincian Output) sebagai berikut:

- 1) Reformasi Birokrasi Unit Eselon I;
- 2) Manajemen Transformasi Organisasi;
- 3) Pengelolaan Pegawai ;
- 4) Tata Kelola TNDE;
- 5) Kerumah-tanggaan;
- 6) Advokasi Hukum;
- 7) MOU dengan APH dan Instansi lain terkait;
- 8) Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I;
- 10) Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I;
- 11) Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI;
- 12) Strategi Komunikasi;
- 13) Publikasi;
- 14) Laporan Keuangan Unit Eselon I;
- 15) Laporan Keuangan Unit Eselon II;
- 16) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI;
- 17) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI;
- 18) Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan;
- 19) Gaji dan Tunjangan;
- 20) Opsionalisasi Kantor DJPI; dan
- 21) Operasionalisasi Kantor masing-masing Direktorat di Lingkungan DJPI.

2. Kerangka Pendanaan

Sesuai Rencana Strategis DJPI TA. 2020-2024 terdapat total anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada awal tahun yaitu sebesar Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah:

Tabel 2

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Menurut Renstra DJPI TA.2020-2024
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun Anggaran 2021

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	112.207
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :				
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		15	
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10	
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10	
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%	10	
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				67.094
OUTPUT KEGIATAN :				
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	Layanan	1	300
	1 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	300
2	Manajemen Transformasi Organisasi	Layanan	2	1.200
	1 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	1.200
3	Pengelolaan Pegawai	Orang	260	1.500

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	1.500
4		Tata Kelola TNDE dan Arsip	Layanan	1	500
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	500
5		Kerumahtanggaan	Layanan	2	1.000
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	2	1.000
6		Advokasi Hukum	Layanan	2	800
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	800
7		MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	Layanan	1	400
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	400
8		Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Layanan	3	1.500
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	1.500
9		Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	Layanan	1	890
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	890
10		Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	Layanan	2	1.300
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	2	1.300
11		Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	Layanan	1	500
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	500
12		Strategi Komunikasi	Layanan	2	1.100
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	1.100
13		Publikasi	Layanan	2	800
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	2	800
14		Laporan Keuangan Unit Eselon I	Laporan	1	500
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	500
15		Laporan Kinerja Unit Eselon II	Laporan	1	300
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	300

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
16		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	Laporan	1	1.000
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	1.00
17		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	Unit	1	500
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	500
18		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	Unit	1	500
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	500
19		Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	410
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	410
20		Gaji dan Tunjangan DJPI	Layanan	1	26,292
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	26,292
21		Operasionalisasi Kantor DJPI	Layanan	1	20,802
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	20,802

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

A. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami Restrukturisasi Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Untuk mencapai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai target yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Data Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021 secara lengkap dijabarkan dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

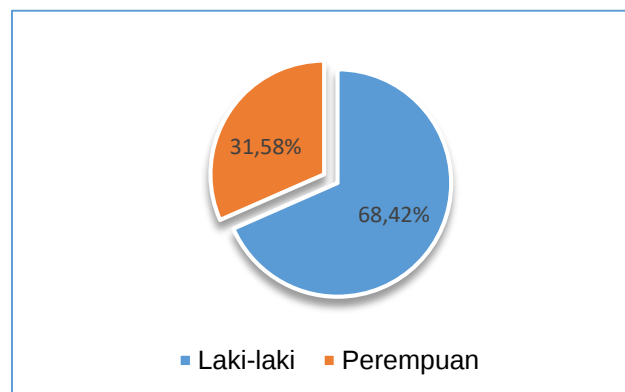
No	Golongan	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Belum Terdata	
1	IV/e	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IV/b	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	IV/a	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	III/d	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9
7	III/c	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	11
8	III/b	0	2	2	0	0	0	3	0	0	0	7
9	III/a	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	10
10	II/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II/c	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	4
12	II/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II/a	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
14	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	13	26	3	0	1	7	0	0	0	51

Tabel 4
Rekapitulasi Pendidikan Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS		TOTAL
			PNPNS	KI	
1	S3	1	0	1	2
2	S2	13	2	4	19
3	S1	26	17	18	61
4	D3	3	7	0	10
5	D2	0	0	0	0
6	D1	1	0	0	1
7	SLTA	7	13	2	32
8	SLTP	0	0	0	8
9	SD	0	0	0	0
10	BELUM TERDATA	0	0	0	0
TOTAL		51	39	25	133

Tabel 5
Rekapitulasi Gender Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

NO	Gender	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	91	68,42
2	Perempuan	42	31,58
3	Total	133	100



Gambar 8
Grafik Gender Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

Tabel 6

Rekapitulasi Usia Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

No	UMUR	S3		S2		S1		D3		D2		D1		SLTA		SLTP		SD		TOTAL
		Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	
1	DI BAWAH 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20-25	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
3	26-30	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	28
4	31-35	0	0	1	1	3	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	15
5	36-40	1	0	2	4	1	9	1	3	0	0	0	0	1	6	0	3	0	0	31
6	41-45	0	0	2	2	3	5	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	18
7	46-50	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	12
8	51-55	0	0	2	3	0	5	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	16
9	56-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
10	DI ATAS 60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
JUMLAH		2	0	8	11	21	40	4	6	0	0	0	3	7	23	0	8	0	0	133

Tabel 7

Rekapitulasi Gender Berdasarkan Golongan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

No	Golongan	Gender				Total	
		Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	IV/e	1	100,00	0	0,00	1	100,00
2	IV/d	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	IV/c	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	IV/b	3	100,00	0	0,00	3	100,00
5	IV/a	1	33,33	2	66,67	3	100,00
6	III/d	6	66,67	3	33,33	9	100,00
7	III/c	7	63,64	4	36,36	11	100,00
8	III/b	6	85,71	1	14,29	7	100,00
9	III/a	6	60,00	4	40,00	10	100,00
10	II/d	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	II/c	3	75,00	1	25,00	4	100,00
12	II/b	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	II/a	2	66,67	1	33,33	3	100,00
14	I/d	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	I/c	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	I/b	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	I/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH		35	69,23	16	30,77	51	100,00

Tabel 8

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

NO	Menurut Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	1
2	Eselon II	1
3	Eselon III	3
4	Jabatan Fungsional Tertentu	26
5	Jabatan Fungsional Umum	9
Jumlah		40

Tabel 9

Rekapitulasi Jabatan Fungsional
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021

No.	Jabatan Fungsional	Total
1	Utama	1
	Aktif	1
	Non Aktif	0
2	Madya	5
	Aktif	1
	Non Aktif	4
3	Muda	15
	Aktif	14
	Non Aktif	1
4	Pratama	12
	Aktif	12
	Non Aktif	0
TOTAL		33

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Para Kepala Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh Koordinator dan beberapa Subkoordinator serta Jabatan Fungsional. Data mengenai Koordinator, Subkoordinator dan Jabatan Fungsional seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 10

Subkoordinator

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

No	NAMA	Subkoordinator
Bagian Kepegawaian dan Umum		
1	Abidin, SIP, M. Si	Koordinator Bidang Tugas Refomasi Birokrasi
2	Ni Wayan Sumila Dewi, S.Sos., M.Ak.	Sub Koordinator Bidang Tugas Pengelola Jabatan Fungsional
3	Bayu Kusuma Dwi Chandra Sarie S.T., M.Si.	Sub Koordinator Bidang Tugas Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Pegawai
4	Fitriana Ayu Ningrum S.H.	Sub Koordinator Bidang Tugas Organisasi dan Tata Laksana

No	NAMA	Subkoordinator
5	Rahaju Sutjipta, S.Sos	Sub Koordinator Bidang Tugas Umum dan Kerumahtanggaan
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik		
5	Putrawan S.H.	Sub Koordinator Bidang Tugas Advokasi Hukum
6	-	Sub Koordinator Bidang Tugas Perundang-undangan
7	Fenty Meilisya Syafril, S.Sos., M.Si.	Sub Koordinator Bidang Tugas Komunikasi Publik
Bagian Perencanaan Program dan Keuangan		
8	Joko Tri Kusnanto, S.T.	Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Program Anggaran
9	Sukimo, S.Ipem	Sub Koordinator Bidang Tugas Pengelolaan Keuangan APBN dan Barang Milik Negara
10	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom., M.M.	Sub Koordinator Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran
11	Fanidya, S.E., M.E.	Sub Koordinator Bidang Tugas Kas dan Perbendaharaan
12	Nila Kusumastuti, S.E.	Sub Koordinator Bidang Tugas Verifikasi dan Pelaporan Keuangan

Tabel 11

Jabatan Fungsional

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

NO.	NAMA	JABATAN
Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan		
1	Nila Kusumastuti, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
2	Fanidya, SE, ME	Analisis Anggaran Ahli Muda
3	Rindy Roosmala Prameswari, S.ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
4	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom, MM	Analisis Anggaran Ahli Muda
5	Puteri Rizqi Amelia, ST	Perencana Ahli Pertama
6	Joko Tri Kusnanto, ST	Analisis Anggaran Ahli Muda
7	Wirawan Widiyanto ST	Peneliti Ahli Pertama
8	Fikri Nuru Jaman, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
9	Sukirno, S.Ipem	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
10	Tatang Rasidin, SAP	Arsiparis Ahli Muda

NO.	NAMA	JABATAN
11	Lucky Astri Fitriana SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
12	Sumardi, SE	JFU
13	Moch Resya Choriawan	JFU
14	Kurniawan Tri Utomo, S. Ikom	JFU
15	Gede Yoga Mahendra, SE	JFU
16	Diana Suryana Putra, SAP	JFU
17	Lutfia Herawati, SE	JFU
18	Faisal Bagus Prakoso, A.Md.Ak	JFU
Bagian Kepegawaian dan Umum		
19	Abidin, SIP, M. Si	Analisis Kepegawaian Ahli Madya.
20	Jaffri, S.Kom, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
21	Ni Wayan Sumila Dewi, S.Sos, M. Ak	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
22	Bayu Kusuma Dwi C.S., ST, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
23	Mendung Sunarno, S. AP	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
24	Arif Harsa Pradipta, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
25	Fitriana Ayu Ningrum, SH	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
26	Rahaju Sutjipta, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda
27	Iin Imania, SE	Arsiparis Ahli Muda
28	Yuda Musthofa, SH	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
29	Rio Febrianto Moroisa	JFU
30	Ni Putu Intan Ade Liana, A.P.Kb.N	JFU
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik		
31	Putrawan, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
32	Yudhistira Adi Nugroho, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama
33	Ruby Esti Aprillia, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Pertama
34	Valentino Jake Setyawan, SH	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
35	Fenty Meilisya Syafril S.Sos, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda

Selain Koordinator, Subkoordinator dan staf dengan Jabatan Fungsional, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Kepala Bagian juga dibantu oleh Pegawai Non PNS Pendukung dan Konsultan Individual yang direkrut untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada seluruh unsur di Direktorat Jenderal . Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Yudhantoro, S.Pt, M.Pd	Penelaah BMN
2	Erwin, SP	Penyusun Program dan Rencana Anggaran
3	Haerul Anwar, SAP	Penyusun Monev dan Pelaporan
4	Haqqi Harisina, S.Kom	Penelaah BMN
5	Patria Trian Setiadi, S.Pd	Penelaah Keuangan
6	Muhammad Jaya AW, SE	Penelaah Keuangan
7	Indriati, A.Md	Penata Keuangan
8	Nurmawati	Pengadministrasi Umum
9	Denny Darmawan	Pengadministrasi Umum
10	Endang Rusmaya	Pengadministrasi Umum
11	Gilang Bayu Perdana, S.Kom, M.M.S.I	Perencana Jaringan Utilitas
12	Sartini, SE	Penelaah Keuangan
13	Suryanah, S.Pd.	Penelaah Tata Naskah Dinas
14	Edi Prastiyo, S.Kom	Penelaah Tata Naskah Dinas
15	Ruri Rumita Maizar, S.Psi	Penelaah Tata Naskah Dinas
16	Khoirul Anwar, S.Sos.I	Penelaah Keuangan
17	Sofian Yusuf Widodo, S.Psi	Analisis Karir dan Kompetensi
18	Budianto, SE	Penelaah Keuangan
19	Haryunta Rizky Pratama, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas

NO	NAMA	JABATAN
20	Muhamad Muklis, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
21	Rahmatullah, A.Md	Penata Keuangan
22	Isam Purbaya, A.Md	Penata Urusan Keprotokolan
23	Tatang	Petugas Teknik
24	Suroto	Petugas Teknik
25	Hari Roberto	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
26	Sobirin	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
27	Riki Salman Mubarq	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
28	Jumadi	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
29	Halimahtus Sadiyah	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
30	Putri Asiah	Pengadministrasi Umum
31	Dwi Priyono	Pengadministrasi Umum
32	Marlinah	Pengadministrasi Umum
33	Shara Vadya, S.I.Kom	Penelaah Pelayanan Informasi Publik
34	Dony Triastomo, SE	Penelaah Advokasi Hukum
35	Insan Hermawanto, SAP	Penelaah Publikasi
36	Andi	Pengadministrasi Umum
37	Dwi Cristianto	Pengadministrasi Umum
38	Komarudin	Pengadministrasi Umum
39	Michael Adha	Pengadministrasi Umum

Tabel 13

Daftar Konsultan Individual

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

NO	NAMA	Bidang Pekerjaan
1	Joko Pitono, ST	Konsultan Individual Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
2	Diane Khattrin Tri Asih, SE	Konsultan Individual Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Kurtubi, ST	Konsultan Individual Bidang Penyusunan Dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran
4	Mohamad Iqbal, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Penyusunan Dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran
5	Didik Pramono, S.PD	Konsultan Individual Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Singgih Zatomi, SH	Konsultan Individual Bidang Pengelolaan Administrasi Anggaran
7	Sunardi	Terampil Kelistrikan
8	Arfan Haras, Spi, MM	Konsultan Individual Bidang Manajemen Aset
9	Sri Andriyani, SH, M.Si	Bidang Kelembagaan
10	Gema Milda Hidayati, S.Pd	Bidang Pembinaan Pegawai
11	Zahrah Fadhilah Nindita, ST	Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
12	Khoirul Mu'minin, S.Tr.T	Bidang Administrasi dan Pemutakhiran Data
13	Afandi	Terampil Teknisi/ Mekanik
14	Disa Tafira Raimalda, SH	Konsultan Individual Bidang Hukum
15	Iva Parikhah, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Komunikasi
16	Sisiana Noer Pradita, S.I.P	Konsultan Individual Bidang Komunikasi
17	Wildan Ilham Mahibuddin, S.Sn	Konsultan Individual Bidang Design Grafis
18	Stephanes M. Anugrah. R, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Fotografi
19	Sopan Sopian, S.Sn	Konsultan Individual Bidang Fotografi
20	Fahmi Nurhuda, S.Ds	Konsultan Individual Bidang Desain Grafis

NO	NAMA	Bidang Pekerjaan
21	Fahmi Fu'adi, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Programmer Informasi dan Teknologi
22	Dr. Nur Hendrasto, M.SI, CPC	Tenaga Ahli Bidang Kelembagaan
23	Nida An Khofiyya, ST	Konsultan Individual Bidang Pengelolaan Administrasi Anggaran
24	Ratna Dewi Anggraeni	Bidang Teknis Kajian Perundang-undangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
25	Asep Suryana	Konsultan Individual Bidang Informasi dan Teknologi

B. Sarana dan Prasarana

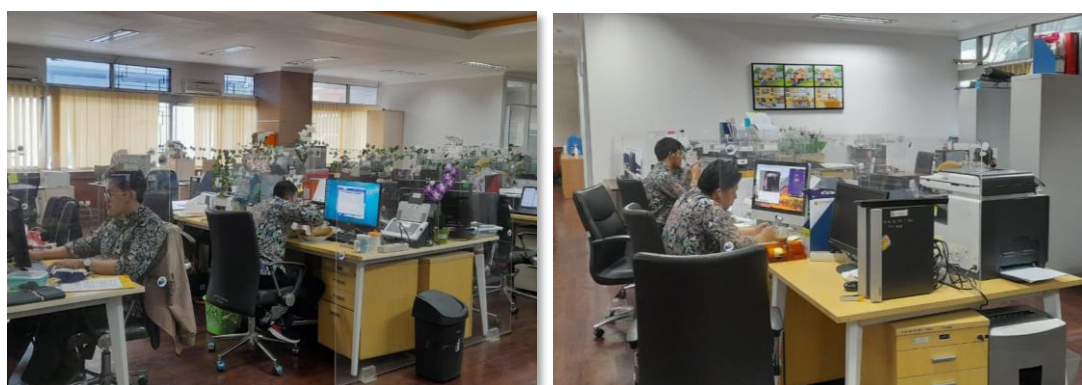
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menempati ruang kerja yang terletak di Lantai 2, Ruangan Wing 1, Wing 2 dan Wing 3, Gedung A Jalan Raden patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja, baik berupa barang fisik (*hardware*) maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya.

Rekap Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu tertera pada tabel berikut:

Tabel 14
Rekap Daftar Barang Ruangan
Lantai 2 Wing 1
(Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Perencanaan Program dan Keuangan)

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Lemari Besi/Metal	13
2	Lemari Kayu	1
3	Filing Cabinet Besi	1
4	CCTV - Camera Control Television System	1
5	Alat Penghancur Kertas	8
6	White Board Electronic	1
7	Acces Control System	1
8	Focusing Screen/Layar LCD Projector	0
9	Meja Kerja Kayu	43

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
10	Meja Rapat	1
11	Kursi Fiber Glas/Plastik	52
12	Cubikal	39
13	Air Cleaner	1
14	A.C. Sentral	5
15	A.C. Split	6
16	Exhause Fan	6
17	Kitchen Set	1
18	Televisi	3
19	Camera Video	1
20	Dispenser	1
21	Handy Cam	1
22	Tripod Camera	1
23	Camera Digital	6
24	Handy Talky (HT)	4
25	P.C Unit	43
26	Note Book	4
27	Tablet PC	3
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10
30	Acces Point	1
31	LCD Projector/Infocus	1



Gambar 9

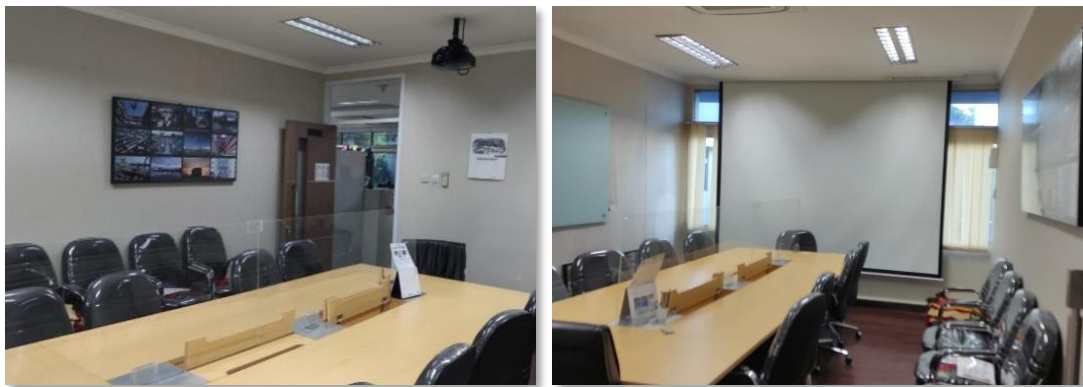
Lantai 2 Wing 1

(Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian
Perencanaan Program dan Keuangan)

Tabel 15

Rekap Daftar Barang, Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 wing 1

NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Meja Rapat	1
2	Kursi Fiber Glas/plastik	16
3	A.C Sentral	1
4	LCD Infocus	1
5	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
6	Cubical	1



Gambar 10

Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lantai 2 Wing 1

Tabel 16

Rekap Daftar Barang Ruangan
Lantai 2 Wing 2

(Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Lemari Besi/Metal	9
2	Lemari Kayu	8
3	Rak Kayu	1
4	CCTV - Camera Control Television System	1
5	Alat Penghancur Kertas	3
6	White Board Electronic	1
7	LCD Projector/Infocus	1
8	Acces Control System	1
9	Focusing Screen/Layar LCD Projector	0
10	Meja Kerja Kayu	4

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
11	Meja Rapat	1
12	Meja Resepsionis	5
13	Meja Makan Kayu	0
14	Kursi Fiber Glas/Plastik	31
15	Cubikal	3
16	Meubelair Lainnya	1
17	Air Cleaner	2
18	Lemari Es	1
19	A.C. Sentral	4
20	A.C. Split	4
21	Exhaust Fan	1
22	Kitchen Set	1
23	Televisi	11
24	Dispenser	1
25	Lensa Kamera	2
26	Lampu Blitz Kamera	1
27	Camera Conference	0
28	Mesin Barcode	4
29	Handy Talky (HT)	1
30	Elektrik Thermometer	1
31	Mini Komputer	1
32	P.C Unit	6
33	Note Book	1
34	Tablet PC	2
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
37	Access Point	1



Gambar 11
Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lantai 2 Wing 2

Tabel 17

Rekap Daftar Barang di Ruang Rapat Lantai 2 Wing2

NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Meja Rapat	2
2	Kursi Fiber Glass/Plastik	19
3	A.C Sentral	2
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
5	Cubical	2
6	Televisi	1
7	Meja makan kayu	6
8	P.C Unit	1
9	Camera Conference	1
10	Air Cleaner	1



Gambar 12

Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 2

Tabel 18

Rekap Daftar Barang Ruangan
Lantai 2 Wing 3
(Ruang Bagian Kepegawaian dan Umum)

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Lemari Besi/Metal	9
2	Lemari Kayu	4
3	Rak Besi	20
4	Rak Kayu	6
5	Filing Cabinet Besi	4
6	Laci Box	2

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
7	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	2
8	CCTV - Camera Control Television System	2
9	Alat Penghancur Kertas	2
10	White Board Electronic	1
11	Laser Pointer	6
12	LCD Projector/Infocus	4
13	Softboard	1
14	Acces Control System	1
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
16	Meja Kerja Kayu	29
17	Kursi Besi/Metal	23
18	Meja Rapat	6
19	Meja Komputer	1
20	Meja Makan Kayu	6
21	Kursi Fiber Glas/Plastik	99
22	Nakas	23
23	Cubical	22
24	Meubelair Lainnya	25
25	Air Cleaner	2
26	Lemari Es	5
27	A.C Sentral	6
28	A.C Split	3
29	Kipas Angin	2
30	Exhause Fan	1
31	Oven Listrik	1
32	Kitchen Set	1
33	Televisi	8
34	Sound System	1
35	Wireless	1
36	Mic Conference	1
37	Camera Video	1
38	Voice Recorder	10
39	Tripod Camera	1

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
40	Lensa Kamera	5
41	Camera Adaptor	1
42	Camera Digital	12
43	Camera Conference	6
44	Mesin Jilid	2
45	Handy Talky (HT)	15
46	Unit Remote Control	6
47	Elektrik Thermometer	2
48	Mini Komputer	3
49	P.C Unit	49
50	Lap Top	3
51	Note Book	16
52	Tablet PC	13
53	Monitor	3
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9
56	Router	2
57	Acces Point	1
58	Network Cable Tester	1
59	Peralatan Jaringan Lainnya	2



Gambar 13
Ruang Bagian Kepegawaian dan Umum
Lantai 2 Wing 3

Tabel 19
Rekap Daftar Barang di Ruang Rapat 1
Lantai 2 Wing 3

NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Meja Rapat	1
2	Kursi Fiber Glas/Plastik	32
3	A.C. Sentral	2
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
5	Cubical	1
6	Televisi	1
7	Air Cleaner	1
8	Meja makan kayu	2
9	Mic Conference	1



Gambar 14

Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3

Tabel 20
Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 2, Lantai 2 Wing3

NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Meja Rapat	1
2	Kursi Fiber Glas/Pastik	19
3	A.C. Sentral	1
4	LCD Infocus	1
5	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
6	Cubical	1
7	Air Cleaner	1



Gambar 15

Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3

Catatan:

Rincian sarana dan prasarana tertera dalam **Lampiran 4** pada *Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Setditjen telah melaksanakan lelang Barang Milik Negara secara daring (online) melalui laman www.lelang.go.id berupa:

1. Lelang Peralatan Kantor sebanyak 73 unit pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 1 September 2021. Adapun Waktu Pelaksanaan proses lelang secara lengkap seperti tercantum pada Lampiran 1;
2. Lelang Kendaraan Operasional (KDO) di tahun 2021 sebanyak 11 kendaraan roda 4 (empat) dan 6 kendaraan roda 2 (dua) pada tanggal 28 Oktober – 29 November 2021 dan 20-28 Desember 2021. Adapun Waktu Pelaksanaan proses lelang secara lengkap seperti tercantum pada Lampiran 1.

C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Anggaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara murni Bagian Anggaran (BA) 033. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Renstra DJPI 2020 - 2024, yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan.

Pada awal tahun anggaran 2021 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal sejumlah Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), dimana telah terjadi beberapa kali revisi yang mempengaruhi perubahan anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA 1 : pada tanggal 18 Februari 2021 karena adanya *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Tahap 1 dengan Anggaran sebesar Rp61.967.862.000,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah),
- 2) Revisi DIPA 3 : pada tanggal 3 Juli 2021 karena adanya Penambahan Gaji dan Tunjangan dari Sekjen dan Ditjen Bina Marga dengan Anggaran sebesar Rp72.567.862.000,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 3) Revisi DIPA 4 : pada tanggal 28 Juli 2021 karena adanya Refocusing dan Realokasi Tahap 3 dengan pagu Anggaran sebesar Rp72.426.622.000,00 (Tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 4) Revisi DIPA 5 : pada tanggal 20 Agustus 2021 karena adanya Refocusing dan Realokasi Tahap 4 dengan Anggaran sebesar Rp70.177.235.000,00 (Tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5) Revisi DIPA 8 : pada tanggal 2 November 2021 dengan total pagu Anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu dari Direktorat PPISDA yang dialokasikan untuk:
 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pengadaan separator, akrilik ruangan, meja, lemari besi dan meubelair CPNS;

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI berupa pengadaan komputer untuk CPNS sebanyak 26 unit dan PNS sebanyak 5 unit;
- 6) Revisi DIPA 9 tanggal 1 Desember 2021 yang disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran dari gaji dan tunjangan ke operasional kantor DJPI dengan Pagu Anggaran berubah menjadi sebesar Rp70.177.235.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Catatan:

Rincian DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021 tertera dalam **Lampiran 3** pada *Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pencapaian kinerja tahun 2021 ini, merupakan umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan 21 (dua puluh satu) komponen (output kegiatan), yaitu :

- 1) Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi
- 2) Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi
- 3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai
- 4) Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip
- 5) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan
- 6) Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum
- 7) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama
- 8) Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

- 10) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan
- 11) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN
- 12) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat
- 13) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi
- 14) Jumlah Laporan Keuangan
- 15) Jumlah Laporan Kinerja
- 16) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
- 17) Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran
- 18) Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
- 19) Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
- 20) Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan
- 21) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor

Tabel 21
Capaian Kinerja TA. 2021

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021
Sesuai Cascading Renstra DJPI Tahun Anggaran 2020-2024

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%)	10%	Tata Kelola TNDE dan Arsip	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	100%	1	1	100%	15%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%)	10%	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	50%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	100%	1	1	100%	
				Kerumahtanggaan	50%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	100%	2	2	100%	
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	15%	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	100%	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	100%	1	1	100%	
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	15%	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	100%	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi		1	1	100%	

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	20%	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	20%	1	1	100%	
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%)	30%	Advokasi Hukum	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	100%	2	2	100%	15%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	20%	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	100%	1	1	100%	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3	3	100%	

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasi an Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)	25%	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	100%	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	100%	1	1	100%	10%
		Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)	25%	Manajemen Transformasi Organisasi	100%	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	100%	2	2	100%	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)	50%	Pengelolaan Pegawai	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	100%	3	3	100%	
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%)	50%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	50%	Jumlah Laporan Monev DJPI	100%	1	1	100%	10%
				Laporan Keuangan Eselon I	50%	Jumlah Laporan Keuangan	100%	1	1	100%	
		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Laporan Kinerja Unit Eselon II	100,0 %	Jumlah Laporan Kinerja	100%	1	1	100%	
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur	15%	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	50%	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	100%	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	100%	1	1	100%	15%

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Pekerjaan Umum dan Perumahan		dibandingkan dengan target (50%)									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	100%	2	2	75%	
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Strategi Komunikasi	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	100%	2	2	100%	10%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Publikasi	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	100%	2	2	100%	

Pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 22
Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	63,35	63,35
SK. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15
IKK Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	10
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	10
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10	10

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PDDPP mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar 63,35% dari target sebesar 63,35% sehingga pada IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR kinerjanya mencapai 100% Untuk Capaian Sasaran Kegiatan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terbagi dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- 1) IKK 1, Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan capaian Kinerja sebesar 15,00%;
- 2) IKK 2, Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan capaian kinerja sebesar 15,00%;
- 3) IKK 3, Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 10,00%;
- 4) IKK 4, Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 10%;
- 5) IKK 5, Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur sebesar 15,00%; dan
- 6) IKK 6, Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik sebesar 10%

B. Perbandingan Kinerja Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2020

- Alokasi DIPA awal Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal yaitu sebesar Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdapat perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Perubahan berasal dari adanya *Refocusing* anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana Covid-19 pada Revisi DIPA ke 2, pada tanggal 27 April 2020.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PPDPP mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar 55,50% dari target sebesar 55,92% sehingga pada IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR kinerjanya mencapai 99,25%;
- Realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp61.069.513.000,00 (enam puluh satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan progress keuangan sebesar keuangan 90,29% dan fisik 90,68% (status *ie*-Monitoring Online pada tanggal 13 Januari 2021);
- Adanya bencana Pandemi Covid-19, selain merubah Pagu Anggaran tahun 2020 juga merubah pelaksanaan cara bekerja di beberapa kegiatan seperti pelaksanaan rapat, pelaksanaan Diklat, bimbingan teknis/ pelatihan yang semula dilakukan dengan tatap muka secara langsung beralih menjadi pertemuan virtual online melalui video conference, hal ini menjadikan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga berpengaruh juga terhadap realisasi anggaran;

b. Tahun Anggaran 2021

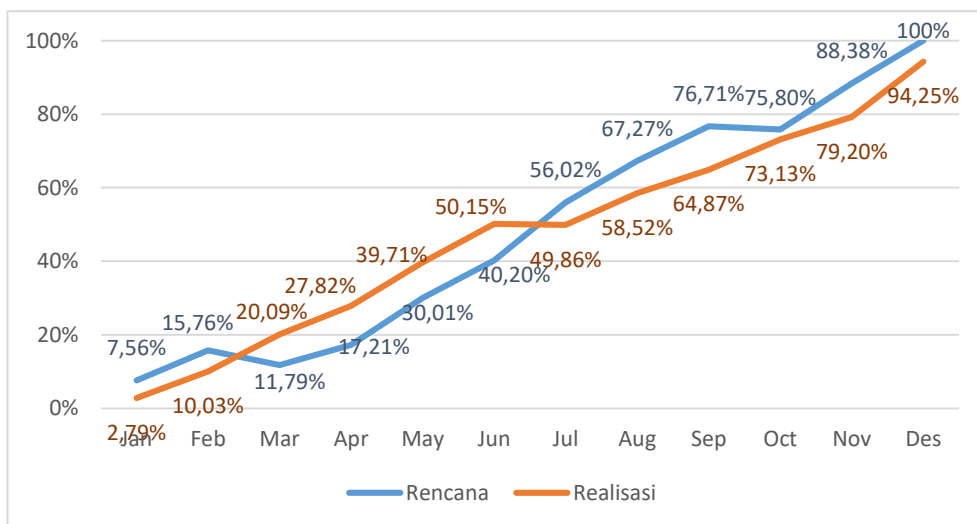
- Alokasi DIPA awal Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal yaitu sebesar Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), terdapat 5 (lima) kali perubahan total pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2021 dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA

8 tanggal 2 November 2021 yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu dari Direktorat PPISDA yang dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI dengan pagu anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

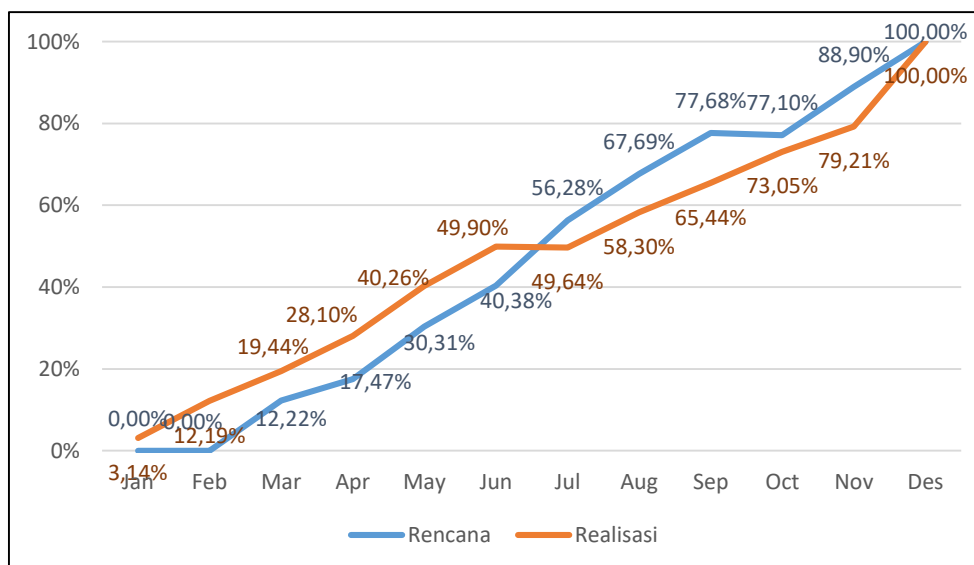
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PPDPP mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar 63,35% dari target sebesar 63,35% sehingga pada IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR kinerjanya mencapai 100%;
- Realisasi Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp66.168.509.000,00 (enam puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan progress keuangan sebesar keuangan 94,25% dan fisik 100% (status *ie-Monitoring Online* pada tanggal 10 Januari 2022);
- Pelaksanaan cara bekerja belum kembali normal akibat masih adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM di sepanjang bulan Juni sampai dengan September sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Beberapa kegiatan yang belum kembali normal diantaranya adalah pelaksanaan rapat, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis/ pelatihan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka secara langsung beralih menjadi pertemuan virtual online melalui video conference;
- Refocusing dan *Realokasi* Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di sepanjang Tahun Anggaran 2021:
 - Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang menginstruksikan kepada seluruh elemen Pemerintahan dalam mengatasi dampak Pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan adanya Perubahan Pagu Anggaran di Lingkungan DJPI termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - *Refocusing* dan Realokasi Anggaran yang bersumber dari Belanja Barang dan Belanja Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 menyebabkan terjadinya perubahan rencana kegiatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

C. Realisasi Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki total anggaran awal sebesar Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), terdapat 5 (lima) kali perubahan pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2021 dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 8 tanggal 2 November dengan pagu anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Gambar 9
Grafik Kurva S Realisasi Keuangan
(status *ie*-Monitoring Online pada tanggal 10 Januari 2022)



Gambar 10
Grafik Kurva S Realisasi Fisik
(status *ie*-Monitoring Online pada tanggal 10 Januari 2022)

Pada akhir Tahun Anggaran 2021 realisasi anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp66.168.509.000,00 (enam puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan progres keuangan sebesar 94,25% dan fisik 100% (status *ie-Monitoring Online* pada tanggal 10 Januari 2022). Realisasi anggaran per kinerja yang ada pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 23
Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sumber : *ie-Monitoring Online* Tanggal 5 Januari 2022

NO	IKK	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	65.902.764.000	61.841.984.000	93,84	94,25	100
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	950.142.000	930.048.000	97,89		
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.385.130.000	1.377.034.000	99,42		
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	742.719.000	735.479.000	99,03		
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	992.487.000	992.485.000	100,00		
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang	1.368.313.000	1.362.964.000	99,61		

NO	IKK	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	modern, terpadu dan berorientasi publik					

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Anggaran untuk per Indikator Kinerja (IKK) yang ada pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Selama Tahun Anggaran 2020, IKK (1) sebesar 93,84%, IKK (2) sebesar 97,89%, IKK (3) sebesar 99,42%, IKK (4) sebesar 99,03% IKK (5) sebesar 100,00% dan IKK (6) adalah sebesar 99,61%.

Sementara untuk Realisasi anggaran Per Komponen yang ada pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 24
Realisasi Anggaran Per-Komponen
Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sumber : *ie-Monitoring Online* Tanggal 10 Januari 2022

IKK	Komponen	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	391.362.000	381.729.000	97,54
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	289.114.000	289.112.000	100,00
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	1.456.828.000	1.380.926.000	94,79
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	1.010.575.000	958.873.000	94,88
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	1.334.322.000	1.321.478.000	99,04
	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	410.000.000	408.332.000	99,59
	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	34.912.420.000	31.038.103.000	88,90

IKK	Komponen	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	21.462.063.000	20.386.082.000	94,99
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	379.018.000	375.881.000	99,17
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	750.000.000	746.940.000	99,59
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	1.000.000.000	983.331.000	98,33
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	1.000.000.000	999.439.000	99,94
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	1.000.000.000	998.313.000	99,83
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	886.080.000	877.841.000	99,07
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	0	0	0,00
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	571.124.000	554.167.000	97,03
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	166.264.000	163.275.000	98,20
	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	617.493.000	614.085.000	99,45

IKK	Komponen	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase
Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	601.373.000	599.674.000	99,72
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Monev DJPI	205.855.000	201.949.000	98,10
	Jumlah Laporan Keuangan	125.764.000	123.286.000	98,03
	Jumlah Laporan Kinerja	411.100.000	410.244.000	99,79
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	404.142.000	404.142.000	100,00
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	588.345.000	588.343.000	100,00
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	786.532.000	781.993.000	99,42
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	581.781.000	580.971.000	99,86

Dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal sepanjang Tahun Anggaran 2021, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melaksanakan Kegiatan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 25

Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun Anggaran 2021

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
1	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan: • Penyemprotan disinfektan di semua ruangan unit kerja • Pelaksanaan Test Swab Antigen setiap hari	 

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
	• Pelaksanaan PCR Test • Pemberian penambahan daya tahan tubuh dengan vitamin	 

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
2	Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan LK dan LBMN (Unaudited) TA.2020 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 27-29 Januari 2021	
3	Revisi DIPA Ke-1 (Satu) Kewenangan DJA, dan POK Revisi 1 (Satu) dan POK Revisi 2 (Dua) dengan metode Zoom Meeting, pada tanggal 14 Februari 2021	
4	Rapat Koordinasi Sosialisasi penyebaran Informasi hukum bidang perumahan di Hotel Rizen Kedaton, Bogor pada tanggal 15 - 17 Februari 2021	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
5	Sosialisasi penyusunan peraturan perundang-Undangan bidang Pembiayaan Infrastruktur, di Hotel Sotis Kemang, Jakarta pada tanggal 4 Maret 2021	
6	Rapat Koordinasi Persiapan Penghapusan BMN di Ruang Rapat 1, Gedung A1 Lantai 2 wing 3, DJPI, Jakarta. Pada tanggal Selasa, 9 Maret 2021	
7	Rapat Pembahasan Butir-butir Kegiatan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Yusro Inn Hotel Bekasi , pada tanggal 22-23 Maret 2021	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
8	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip dan TNDE di Sentul City, pada tanggal 11 - 12 April 2021	
9	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I dan Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021, di Hotel Santika Premiere Bintaro, pada tanggal 20 April 2021	
10	Rapat Evaluasi Kinerja DJPI Triwulan 1 dan Strategi Persiapan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA. 2021 di Gedung ATR/BPN ex Kemenpera Lantai 9, pada tanggal 29 April 2021	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
11	Evaluasi Uji Coba Pengisian Kuisisioner Uji Beban JF Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Sentul Bogor pada tanggal 7-8 Mei 2021	
12	Rapat FGD Pembinaan Produk Hukum Bidang Pembiayaan Perumahan, di Rizen Kedaton Hotel & Resort, pada tanggal Bogor 2 - 4 Juni 2021.	
13	Penelitian dan Reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2022 di Swiss-Bellhotel BSD-Tangerang Selatan, pada tanggal 20 s.d. 24 September 2021	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
14	Rapat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021 di Aviary Hotel Bintaro, pada tanggal 16-17 Oktober 2021	
15	Sinkronisasi Data pada Aplikasi Tunjangan Kinerja, di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI, pada tanggal 27 Oktober 2021	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
16	Pembahasan Progres Pelaksanaan Prognosis DJPI TA 2021 di RR 1 Lantai 2 Wing 3 pada Tanggal: 30 September 2021, Tanggal 5, 11, 18, 25 Oktober 2021 dan Tanggal 1 November 2021	
17	Pembahasan Progres Pelaksanaan Prognosis di Setiap Unit Kerja DJPI yang memiliki kegiatan krusial di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, pada Tanggal 17 November 2021	
18	Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA. 2021 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA, 2022 di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI pada tanggal 6 Desember 2021	

D. Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Sebelumnya (2020)

Tabel 26

Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2021

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perencanaan Kinerja	- Perlu menyampaikan usulan terkait mekanisme revidi terhadap Dokumen Renstra, - Perlu dilakukan revidi terhadap Dokumen Renstra tingkat Eselon II secara berkala, agar terdapat keselarasan antara Dokumen Renstra dengan Perjanjian Kinerja,	• Penyusunan Laporan Bulanan untuk lebih diperhatikan waktu pengumpulan guna menghindari keterlambatan dalam kegiatan evaluasi, • Perlu adanya pelaksanaan evaluasi internal secara berkala (diperkirakan setiap 3 bulan) termasuk didalamnya evaluasi dokumen perencanaan secara berkala, • Perbaikan berdasarkan rekomendasi Implementasi SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020 dilakukan pada pelaksanaan kegiatan TA. 2021 • Data mengenai realisasi anggaran maupun keuangan yang dicantumkan hendaknya diberi penjelasan mengenai status tanggal atau waktu penerbitan pada saat data dirilis.
Pengukuran Kinerja	- Perlu dirumuskan mekanisme pemberian <i>reward and punishment</i> berdasarkan hasil pengukuran kinerja, - Perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap target kinerja sampai staf, - Perlu adanya tindak lanjut menyeluruh atas rekomendasi tahun lalu terkait tindak lanjut atas hasil monitoring, - Perlu adanya mekanisme terkait revidi indikator kinerja,	
Pelaporan Kinerja	- Informasi yang ada pada laporan kinerja perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi,	
Evaluasi Kinerja	- Perlu ada tindak lanjut secara menyeluruh atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan,	

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Capaian Kinerja	- Capaian kinerja output dan outcome perlu ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya, - Perlu adanya tindak lanjut menyeluruh terhadap pengukuran SKP	

E. Efisiensi dan Efektivitas

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah berjalan dengan efektif dan efisien walaupun ada beberapa kendala sebagai berikut:

1) Perubahan Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

Pada awal tahun anggaran 2021 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal sejumlah Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah). Dimana terdapat beberapa kali perubahan sepanjang Tahun Anggaran 2021 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 tanggal 18 Februari 2021 yang disebabkan oleh adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 1 dengan Pagu Anggaran berubah menjadi sebesar Rp 61.967.862.000,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Revisi DIPA 3 tanggal 3 Juli 2021 yang disebabkan oleh adanya Penambahan Gaji dan Tunjangan dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Pagu Anggaran berubah menjadi sebesar Rp72.567.862.000,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Revisi DIPA 4 tanggal 28 Juli 2021 yang disebabkan karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 3 dengan Pagu Anggaran berubah menjadi sebesar Rp72.426.622.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Revisi DIPA 5 tanggal 20 Agustus 2021 yang disebabkan oleh adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 4 dengan Pagu Anggaran berubah menjadi sebesar Rp70.177.235.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Revisi DIPA 8 : pada tanggal 1 Desember 2021 dengan total pagu Anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disebabkan oleh adanya penambahan pagu dari Direktorat PPISDA yang dialokasikan untuk:
 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pengadaan separator, akrilik ruangan, meja, lemari besi dan meubelair CPNS;
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI berupa pengadaan komputer untuk CPNS sebanyak 26 unit dan PNS sebanyak 5 unit;
 - Alokasi Anggaran untuk Renovasi Gedung A1 Lantai 3;
 - Pengadaan *Barrier Gate* dan peralatan lain terkait renovasi Area Parkir;
 - Alokasi Anggaran untuk fasilitasi kebutuhan terkait kegiatan World Dubai Expo dan Turki.
- Revisi DIPA 9 tanggal 1 Desember 2021 yang disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran dari gaji dan tunjangan ke operasional kantor DJPI dengan Pagu Anggaran berubah menjadi sebesar Rp70.177.235.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

2) Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Revisi DIPA mengakibatkan adanya perubahan Perjanjian Kinerja selama tahun 2021 sebagaimana kronologi di bawah:

- **Pertama**, PK awal pada bulan Januari 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun berdasarkan DIPA awal yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- **Kedua**, PK revisi pertama pada bulan Februari 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 1 pada Revisi DIPA 1 tanggal 18

Februari 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 61.967.862.000,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- **Ketiga**, PK revisi kedua pada bulan Juli 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya 2(dua) kali revisi DIPA di bulan Juli yaitu Revisi DIPA 3 tanggal 3 Juli 2021 yang disebabkan karena adanya Penambahan Gaji dan Tunjangan dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Pagu Anggaran sebesar Rp72.567.862.000,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Revisi DIPA 4 tanggal 28 Juli 2021 yang disebabkan karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 3 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp72.426.622.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- **Keempat**, PK revisi ketiga pada bulan Agustus 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya :
 - Pergantian Pejabat Eselon 1 dan 2 di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu :
 - ✓ Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto MCP. ke Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna S.E., M.T.
 - ✓ Sekretaris Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Ir. Irma Yanti, MT. ke Sudiro Roi Santoso S.T., M.T.
 - *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 dan Realokasi Tahap 4 pada Revisi DIPA 5 tanggal 20 Agustus 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp70.177.235.000,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- **Kelima**, PK revisi keempat pada bulan November 2021 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya penambahan pagu dari Direktorat PPISDA yang dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI pada Revisi DIPA 8 tanggal 2 November 2021

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

3) Perubahan Alokasi Anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2021

Adanya kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran di Lingkungan DJPI mengakibatkan dilakukannya revisi anggaran pada beberapa paket kegiatan di Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, dimana semula anggaran yang dialokasikan untuk 10 Paket Kegiatan menjadi 6 Paket Kegiatan.

Adapun rincian Paket Kegiatan yang hilang adalah sebagai berikut:

- Pada Komponen Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum semula terdapat 2 (dua) Paket Kegiatan menjadi 1 (satu) Paket Kegiatan;
- Pada Komponen Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama semula terdapat 1 (satu) Paket Kegiatan menjadi tidak ada;
- Pada Komponen Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan terdapat 3 (tiga) Paket Kegiatan menjadi 2 Paket Kegiatan;
- Pada Komponen Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat terdapat 2 (dua) Paket Kegiatan menjadi 1 Paket Kegiatan.

Tetapi Paket Kegiatan yang hilang tetap dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pada paket kegiatan yang tidak dihilangkan di dalam Dokumen Revisi DIPA 1 dimana Output yang dihasilkan tetap berjumlah 10 laporan sebagaimana yang tercantum dalam tabel penjelasan berikut ini:

Tabel 27

Perbandingan Jumlah Sub Komponen yang Tercantum
dalam Dokumen DIPA Awal dengan DIPA Revisi 1
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan TA.2021

No.	Komponen/ Output Kegiatan	Target (Laporan)	Sub Komponen/ Paket Kegiatan		Output (Laporan)
			Semula (DIPA Awal)	Menjadi (DIPA Revisi 1)	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	2	Pendampingan Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	-	1
			Pembinaan Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	Pembinaan Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	1

No.	Komponen/ Output Kegiatan	Target (Laporan)	Sub Komponen/ Paket Kegiatan		Output (Laporan)
			Semula (DIPA Awal)	Menjadi (DIPA Revisi 1)	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	1	Pembinaan Kerjasama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	-	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	3	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	1
			Pembinaan dan Pendampingan Peraturan Perundangundangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	Pembinaan dan Pendampingan Peraturan Perundangundangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	1
			Fasilitasi Legislasi Peraturan Perundang Undangan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2021	-	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	2	Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	-	1
			Layanan Kehumasan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	Layanan Kehumasan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi		Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	1

No.	Komponen/ Output Kegiatan	Target (Laporan)	Sub Komponen/ Paket Kegiatan		Output (Laporan)
			Semula (DIPA Awal)	Menjadi (DIPA Revisi 1)	
			Dokumentasi Pimpinan dan Penyebaran Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	Dokumentasi Pimpinan dan Penyebaran Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	1
	Total	10	10	6	10

- 4) Adanya Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran pada Belanja Honorarium dan Perjalanan Dinas dan Paket Meeting mengakibatkan adanya perubahan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yang semula dilakukan dengan tatap muka secara langsung beralih menjadi secara virtual (daring) melalui video conference;
- 5) Adanya penyelenggaraan PPKM Darurat pada tanggal 3-20 Juli 2021 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perkantoran dilaksanakan di rumah.

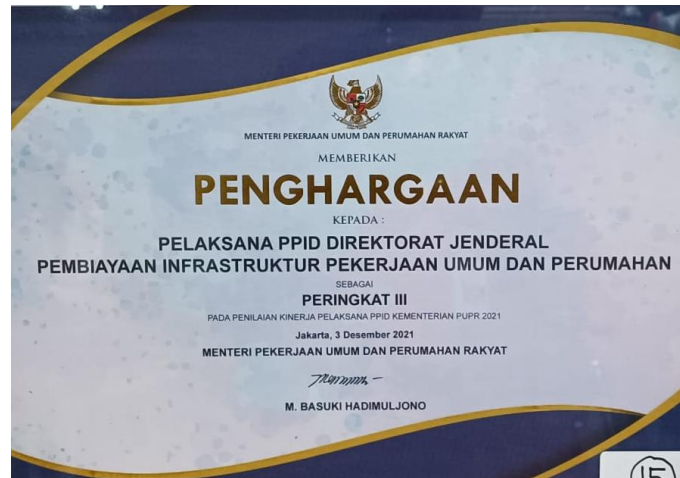
F. Prestasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sepanjang Tahun Anggaran 2021

- 1) Pemenang Lomba Peringatan HUT RI ke 76 di Lingkungan Kementerian PUPR, sebagai:
 - Juara 2 Lomba Video Kreatif Hadapi Covid-19
 - Juara Run and Ride For Donation (Tim DJPI Runners)



Gambar 14
Juara 2 Lomba Video Kreatif

2) Peringkat 3 pada Penilaian Kinerja Pelaksana PPID Kementerian PUPR TA. 2021



Gambar 15
Piagam Penghargaan Peringkat 3 pada Penilaian Kinerja
Pelaksana PPID Kementerian PUPR TA. 2021

3) Beberapa Prestasi yang diraih dalam Pelombaan dalam Rangka Memperingati Hari Bakti PU ke-76 Tahun 2021:

- Juara 1 dalam Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra atas nama Patria Trian Setiadi, S.Pd;
- Juara 3 dalam Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra atas nama Rahaju Sutjipta, S.Sos;
- Juara 1 dalam Pertandingan Tenis Meja Beregu Putra Rahaju Sutjipta, S.Sos.



Gambar 16
Piagam Penghargaan Peringkat 1 pada Pertandingan Tenis
Meja Tunggal Putra
dalam Rangka Hari Bakti PU ke-76



Gambar 17
Piagam Penghargaan Peringkat 3 pada Pertandingan Tenis
Meja Tunggal Putra
dalam Rangka Hari Bakti PU ke-76



Gambar 18
Piagam Penghargaan Peringkat 1 pada Pertandingan
Tenis Meja Beregu Putra
dalam Rangka Hari Bakti PU ke-76



Gambar 16
Para Juara Lomba pada Pertandingan Tenis Meja
dalam Rangka Hari Bakti PU ke-76

- 4) Juara 3 Lomba Virtual Ride Dalam Rangka Hari Jalan 2021 atas nama Yudhantoro,
S.Pt, M.Pd;



Gambar 16

Juara 3 Lomba Virtual Ride Dalam Rangka Hari Jalan 2021

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melaksanakan kegiatan dalam mendukung tercapainya target kinerja pada Tahun Anggaran 2021 dengan baik meliputi capaian administrasi dan penyelesaian fisik, seperti terlihat dalam capaian kinerja indikator kegiatan (*output* kegiatan) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.

Dari pembahasan yang sudah dituangkan dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi capaian kinerja dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama Tahun 2021. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

5.2. Permasalahan

1. Tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang disebabkan adanya pembatasan kegiatan selama PPKM berlangsung di bulan Juli sampai dengan September 2021;
2. Tingkat pemahaman pegawai pada tugas dan fungsi belum optimal, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Kurangnya alokasi anggaran pada:
 - Belanja Modal untuk mengakomodir kebutuhan belanja fasilitas/perlengkapan perkantoran dan renovasi gedung;
 - Belanja Pegawai untuk mengakomodir kebutuhan penambahan pegawai (CPNS, perpindahan pegawai);
4. Kebutuhan ruang kerja pegawai di Lantai 2, Lantai 3, Lantai 6 Gedung A2 serta Lantai 9 (ruang rapat/ ruang serba guna) untuk mengakomodir kebutuhan bertambahnya jumlah pegawai dan ruang rapat;
5. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu. Beberapa permasalahan terkait Jabatan Fungsional di Lingkungan DJPI khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

- Masih banyak PNS yang belum memperoleh penetapan jabatan fungsional dikarenakan belum terpenuhinya 3 (tiga) syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap PNS yang akan beralih ke Jabatan Fungsional yaitu terkait kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
 - Terjadinya penundaan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional di sepanjang TA. 2021 dalam periode bulan April dan Oktober, dikarenakan tidak terpenuhinya akumulasi angka kredit yang dibutuhkan;
6. Terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Negeri (untuk memfasilitasi perjalanan dinas Bapak Dirjen ke Turki dan delegasi DJPI dalam Word Dubai Expo) yang belum teralokasikan perencanaannya sehingga menyebabkan pergeseran anggaran kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
7. Pengalihan penanggung jawab pada cabang olah raga tenis meja yang semula adalah DJPI menjadi Ditjen Bina Marga sehingga membuat anggaran yang telah disiapkan tidak dapat terpakai halini menyebabkan pelaksanaan Paket Kegiatan Fasilitas Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan hanya tercapai sebesar 72,12% sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021;
8. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, Sub Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan hanya mencapai 88,90% hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2021 alokasi untuk pembayaran Tunjangan Kinerja 13, Tunjangan Kinerja 14 PNS dan Lembur tidak direalisasikan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 membatasi beberapa pelaksanaan anggaran sehingga mempengaruhi realisasi anggaran di tahun 2021. Pembatasan tersebut diantaranya adalah:
- Pembayaran Honorarium Swakelola perorang hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) Paket kegiatan;
 - Penerapan *At Cost* (sesuai pengeluaran) biaya transportasi (taksi) untuk Perjalanan Dinas keluar kota;

- Honorarium Kegiatan Swakelola dibayarkan maksimal hanya untuk 2(dua) Paket Kegiatan;
 - Honorarium Narasumber yang berasal dari 1 (satu) Kementerian tidak bisa dibayarkan;
 - Pembatasan pengadaan konsumsi (snack dan makan besar) dalam Kegiatan Rapat;
10. Adanya penurunan batas tarif tertinggi berdasar Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) menjadikan adanya pemotongan anggaran pada Paket Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

5.2. Tindak Lanjut

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti disebutkan di atas maka diperlukan tindak lanjut sebagai langkah perbaikan di kemudian hari. Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi SOP yang telah disusun oleh masing-masing Unit Kerja, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR, sehingga seluruh Pelaksana tugas dapat menerapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan secara berkala melakukan evaluasi atas SOP yang telah disusun untuk disesuaikan dengan kondisi terutama jika ada perubahan regulasi. Dengan demikian pegawai dapat memaknai SOP yang telah disusun, selanjutnya diharapkan tugas dan fungsi yang ada dapat dilaksanakan sesuai SOP dan memberikan output dan hasil kerja yang optimal.
2. Melakukan analisa perencanaan kebutuhan Belanja Modal dan Belanja Pegawai dengan matang agar dapat mengakomodir kebutuhan anggaran Belanja Modal seperti renovasi gedung dan fasilitasi perkantoran serta Anggaran Belanja Pegawai untuk mengakomodir kebutuhan penambahan pegawai (CPNS, perpindahan pegawai);
3. Perlunya evaluasi internal secara berkala untuk memonitor capaian kinerja, tidak hanya melihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga output/outcome yang telah/ belum tercapai (dihasilkan);
4. Meningkatkan kompetensi pegawai, dengan mengikutsertakan dalam pelatihan atau melalui diklat-diklat yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, dan Instansi lainnya, maupun

berdasarkan masukan kebutuhan akan diklat di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

5. Beberapa hal yang perlu dilaksanakan terkait Jafung adalah:
 - Sosialisasi dan Pembinaan tentang pentingnya Jabatan Fungsional kepada seluruh PNS, sesuai amanah yang tercantum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional PNS;
 - Melaksanakan pendampingan dalam Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional terkait dengan substansi tugas dan fungsi dalam melaksanakan pekerjaan;
 - Pengadaan Bimtek Karya Tulis Ilmiah kepada Jabatan Fungsional
 - Pengadaan Klinik Konsultasi untuk membantu dan memotivasi baik itu kepada PNS yang sudah mengemban Jabatan Fungsional maupun belum.
7. Renovasi ruang kerja Lantai 2 dan 3, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan memanfaatkan Gedung A2 Lantai 6 sebagai working space untuk menampung Pegawai Non PNS karena kurangnya luasan Ruang Kerja di Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Penyelarasan Rencana Kegiatan dengan Kebutuhan Anggaran agar sesuai dengan Penilaian Capaian Kinerja di akhir tahun;
9. Melakukan evaluasi atau review terhadap Rencana Strategis secara berkala untuk mengukur pencapaian sesuai dengan target/rencana organisasi.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN



Tahun Anggaran
2021



1) Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun Anggaran 2021

a. Dokumen Perjanjian Kinerja yang terbit pada awal bulan Januari tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**
Jabatan : **Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

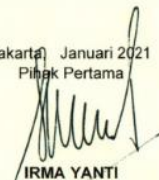
1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama



IRMA YANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50%	13,50%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,25%	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

KEGIATAN
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

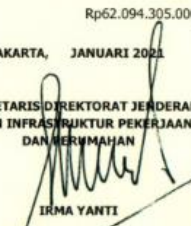


EKO D. HERIPOERWANTO

ANGGARAN
Rp62.094.305.000,00

JAKARTA, JANUARI 2021

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



IRMA YANTI

b. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 yang terbit pada bulan Februari tahun 2021

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Februari 2021
Pihak Pertama



IRMA YANTI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50%	13,50%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,25%	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

KEGIATAN

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp56.967.862.000,00

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



EKO D. HERIPOERWANTO

JAKARTA, FEBRUARI 2021

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



IRMA YANTI

c. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 yang terbit pada bulan Juli 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2021

Pihak Kedua



Eko D. Heripoerwanto

Pihak Pertama



Irma Yanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>JKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	13,50%	15%
<i>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	15%	15%
<i>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	10%	10%
<i>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	10%	10%
<i>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	14,25%	15%
<i>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</i>	10%	10%

KEGIATAN

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp72.426.622.000,00

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



EKO D. HERIPOERWANTO

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



IRMA YANTI

JAKARTA, JULI 2021

d. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 yang terbit pada bulan Agustus 2021

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

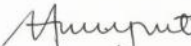
Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama



SUDIRO ROI SANTOSO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

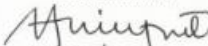
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,25%	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

KEGIATAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN
Rp70.177.235.000,00

JAKARTA, AGUSTUS 2021

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



SUDIRO ROI SANTOSO

a. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ke-4 yang terbit pada bulan November 2021



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

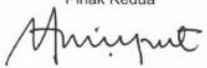
Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, November 2021

Pihak Pertama



SUDIRO ROI SANTOSO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SD. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	13,50%	15%
<i>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	15%	15%
<i>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	10%	10%
<i>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	10%	10%
<i>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	14,25%	15%
<i>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</i>	10%	10%

KEGIATAN

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp71.341.555.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



SUDIRO ROI SANTOSO



BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR: 07 /BA/Ps /2021

**CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1 DJPI telah diadakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021, Rapat pembahasan dimaksud untuk menghasilkan kesepakatan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Anggaran Masing-Masing Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021:

No.	Sasaran Program	Pagu Rp1.000,00	Realisasi Rp1.000,00	Keuangan		Fisik		Capaian (%)
				RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	2.024.320	2.017.076	100%	100%	100%	100%	100%
2	Bagian Kepegawaian dan Umum	66.998.780	62.929.908	100%	94%	100%	95%	95%
3	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	2.318.455	2.293.012	100%	99%	100%	100%	100%
TOTAL		71.341.555	67.239.996	100%	94%	100%	100%	100%

2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 31 Desember 2021

Yang Menyepakati,

Kepala Bagian
Perencanaan Program dan Keuangan



Eko Suhendratma

Kepala Bagian
Hukum dan Komunikasi Publik



Anggoro Widyastika

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Umum



Dessy Nina Wulandari

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Sudiro Roi Santoso

2) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021

a. Dokumen DIPA Setditjen PI Awal yang terbit pada bulan Januari tahun 2021

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
Halaman : I.A. 2						
Klasifikasi Rincian Output	6	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	312,00	Rumah Tangga	10.000.000.000
Rincian Output	01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	312,00	Orang	10.000.000.000
Program	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				175.071.494.000
Kegiatan	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				67.094.305.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP				
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP				
Klasifikasi Rincian Output	1	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	52.094.305.000
Rincian Output	01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI	1,00	Layanan	28.292.062.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI	1,00	Layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1,00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	2.690.000.000
Rincian Output	01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1,00	laporan	890.000.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2,00	laporan	1.300.000.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1,00	laporan	500.000.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
Halaman : I.A. 3						
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						
Klasifikasi Rincian Output	3	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	1.500.000.000
Rincian Output	01	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan	500.000.000
	02	EAC.003	Kemahatanganan	2,00	laporan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output	01	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	500.000.000
	02	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output	01	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	1.500.000.000
Rincian Output	01	EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	4194.EAG	Layanan Hukum	6,00	Layanan	2.700.000.000
Rincian Output	01	EAG.001	Advokasi Hukum	2,00	Layanan	800.000.000
	02	EAG.002	MoU dengan APH dan Instansi Lain terkait	1,00	Layanan	400.000.000
	03	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	3,00	Layanan	1.500.000.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
Halaman : I.A. 4						
Klasifikasi Rincian Output	8	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	1.500.000.000
Rincian Output	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1,00	Layanan	300.000.000
	02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2,00	Layanan	1.200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	4,00	Layanan	1.900.000.000
Rincian Output	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	2,00	Layanan	1.100.000.000
	02	EAI.002	Publikasi	2,00	Layanan	800.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.800.000.000
Rincian Output	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1,00	Laporan	500.000.000
	02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1,00	Laporan	300.000.000
	03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1,00	Laporan	1.000.000.000

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

b. DIPA Setditjen PI Revisi ke-1 yang terbit pada tanggal 18 Februari 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I.A. INFORMASI KINERJA

DS-4853-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I.A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	312,00	Rumah Tangga	10.000.000,000
Rincian Output		01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	312,00	Orang	10.000.000,000
Program		033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			133.619.850,000
Kegiatan		4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			61.967.862,000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	52.094.305,000
Rincian Output		01	EAA.004 Gaji dan Tunjangan DJPI	1,00	Layanan	26.292.062,000
		02	EAA.005 Operasionalisasi Kantor DJPI	1,00	layanan	20.802.243,000
		03	EAA.006 Operasionalisasi Kantor Direktorat	1,00	1	5.000.000,000
Klasifikasi Rincian Output	2	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.258.516,000
Rincian Output		01	EAB.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1,00	laporan	416.431,000
		02	EAB.002 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2,00	laporan	608.135,000
		03	EAB.003 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1,00	laporan	233.950,000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I.A. INFORMASI KINERJA

030-4653-8872-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I.A. 3

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal				Layanan		
Klasifikasi Rincian Output	3	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.805.200,000
Rincian Output		01	EAC.002 Tata Kelola TNDE dan Ansip	1,00	laporan	406.000,000
		02	EAC.003 Kerumahahtagaan	2,00	laporan	2.399.200,000
Klasifikasi Rincian Output	4	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000,000
Rincian Output		01	EAD.003 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	500.000,000
		02	EAD.004 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	500.000,000
Klasifikasi Rincian Output	5	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000,000
Rincian Output		01	EAE.001 Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000,000
Klasifikasi Rincian Output	6	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	605.692,000
Rincian Output		01	EAF.001 Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	605.692,000
Klasifikasi Rincian Output	7	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	961.922,000
Rincian Output		01	EAG.001 Advokasi Hukum	1,00	Layanan	427.204,000
		02	EAG.003 Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	534.718,000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN						
TAHUN ANGGARAN 2021						
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021						
I A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
Halaman : I A. 4						
Klasifikasi Rincian Output	8	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	799.725.000
Rincian Output		01	EAH.001 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1,00	Layanan	100.393.000
		02	EAH.002 Manajemen Transformasi Organisasi	2,00	Layanan	699.342.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.190.282.000
Rincian Output		01	EAI.001 Strategi Komunikasi	1,00	Layanan	587.600.000
		02	EAI.002 Publikasi	2,00	Layanan	602.682.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	842.220.000
Rincian Output		01	EAL.001 Laporan Keuangan Unit Eselon I	1,00	Laporan	233.950.000
		02	EAL.002 Laporan Kinerja Unit Eselon II	1,00	Laporan	140.370.000
		03	EAL.003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1,00	Laporan	467.900.000

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

c. DIPA Setditjen PI Revisi ke-3 yang terbit pada tanggal 3 Juli 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						 DS-3006-0010-8050-2055	
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						Halaman : I A. 2	
Klasifikasi Rincian Output	6	: 4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	1.000.00	Rumah Tangga	45.121.627.000	
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000	
Program	: 033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				156.212.470.000	
Kegiatan	: 4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				72.567.862.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	: 2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	: 3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	: 4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	: 5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	: 6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik					
	: 7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP					
	: 8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP					
Klasifikasi Rincian Output	1	: 4194.EAA	Layanan Perkantoran	3.00	Layanan	62.694.305.000	
Rincian Output	: 01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	36.892.062.000	
	: 02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000	
	: 03	EAA.006	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	5.000.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	: 4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4.00	Layanan	1.258.516.000	
Rincian Output	: 01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	416.431.000	
	: 02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	608.135.000	
	: 03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	233.950.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						 DS-3006-0010-8050-2055	
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						Halaman : I A. 3	
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	: 4194.EAC	Layanan Umum	3.00	Layanan	2.805.200.000	
Rincian Output	: 01	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	431.190.000	
	: 02	EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	2.374.020.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	: 4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2.00	unit	1.000.000.000	
Rincian Output	: 01	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	500.000.000	
	: 02	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	500.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	5	: 4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1.00	unit	410.000.000	
Rincian Output	: 01	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	6	: 4194.EAF	Layanan SDM	260.00	orang	605.692.000	
Rincian Output	: 01	EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	605.692.000	
Klasifikasi Rincian Output	7	: 4194.EAG	Layanan Hukum	3.00	Layanan	961.922.000	
Rincian Output	: 01	EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	249.272.000	
	: 02	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	712.650.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						 DS-3006-0010-8050-2055	
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						Halaman : I A. 4	
Klasifikasi Rincian Output	8	: 4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.00	Layanan	799.725.000	
Rincian Output	: 01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.383.000	
	: 02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	699.342.000	
Klasifikasi Rincian Output	9	: 4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3.00	Layanan	1.190.282.000	
Rincian Output	: 01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	586.808.000	
	: 02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	603.474.000	
Klasifikasi Rincian Output	10	: 4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.00	Laporan	842.220.000	
Rincian Output	: 01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	233.950.000	
	: 02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000	
	: 03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	467.900.000	

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

d. DIPA Setditjen PI Revisi ke-4 yang terbit pada tanggal 28 Juli 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
						Halaman : I.A. 2
Klasifikasi Rincian Output	6	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output	01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				200.197.510.000
Kegiatan	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				72.426.622.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1.01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2.02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3.03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kebutuhan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4.04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5.05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6.06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7.07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8.08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output	1	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	62.694.305.000
Rincian Output	01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI	1,00	Layanan	36.892.062.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI	1,00	layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1,00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.221.601.000
Rincian Output	01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1,00	laporan	404.142.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2,00	laporan	588.077.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1,00	laporan	229.382.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
						Halaman : I.A. 3
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						Layanan
Klasifikasi Rincian Output	3	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.763.835.000
Rincian Output	01	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan	391.362.000
	02	EAC.003	Kerumahtanggaan	2,00	laporan	2.372.473.000
Klasifikasi Rincian Output	4	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output	01	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	500.000.000
	02	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output	01	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output	01	EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output	01	EAG.001	Advokasi Hukum	1,00	Layanan	242.118.000
	02	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	708.024.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021 I.A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Provinsi : (01) DKI JAKARTA						
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
						Halaman : I.A. 4
Klasifikasi Rincian Output	8	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1,00	Layanan	100.288.000
	02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2,00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.183.113.000
Rincian Output	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1,00	Layanan	583.547.000
	02	EAI.002	Publikasi	2,00	Layanan	599.566.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	818.496.000
Rincian Output	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1,00	Laporan	212.437.000
	02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1,00	Laporan	140.370.000
	03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1,00	Laporan	465.689.000

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

e. DIPA Setditjen PI Revisi ke-5 yang terbit pada tanggal 20 Agustus 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN									
TAHUN ANGGARAN 2021									
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021									
I.A. INFORMASI KINERJA									
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
									Halaman : I.A. 2
Klasifikasi Rincian Output	6	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	1.000.00	Rumah Tangga	45.121.627.000			
Rincian Output	01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000			
Program	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				191.697.510.000			
Kegiatan	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				70.177.235.000			
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik							
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP							
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP							
Klasifikasi Rincian Output	1	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3.00	Layanan	61.010.563.000			
Rincian Output	01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	35.572.240.000			
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000			
	03	EAA.006	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	4.636.080.000			
Klasifikasi Rincian Output	2	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4.00	Layanan	1.221.601.000			
Rincian Output	01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	404.142.000			
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	588.077.000			
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	229.382.000			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN									
TAHUN ANGGARAN 2021									
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021									
I.A. INFORMASI KINERJA									
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
									Halaman : I.A. 3
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal									
Klasifikasi Rincian Output	3	4194.EAC	Layanan Umum	3.00	Layanan	2.198.190.000			
Rincian Output	01	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	391.362.000			
	02	EAC.003	Kerumahahtagaan	2.00	laporan	1.806.828.000			
Klasifikasi Rincian Output	4	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2.00	unit	1.000.000.000			
Rincian Output	01	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	550.000.000			
	02	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	450.000.000			
Klasifikasi Rincian Output	5	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1.00	unit	410.000.000			
Rincian Output	01	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000			
Klasifikasi Rincian Output	6	4194.EAF	Layanan SDM	260.00	orang	601.373.000			
Rincian Output	01	EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	601.373.000			
Klasifikasi Rincian Output	7	4194.EAG	Layanan Hukum	3.00	Layanan	950.142.000			
Rincian Output	01	EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	242.118.000			
	02	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	708.024.000			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN									
TAHUN ANGGARAN 2021									
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021									
I.A. INFORMASI KINERJA									
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
									Halaman : I.A. 4
Klasifikasi Rincian Output	8	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.00	Layanan	783.757.000			
Rincian Output	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000			
	02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000			
Klasifikasi Rincian Output	9	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3.00	Layanan	1.183.113.000			
Rincian Output	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	583.547.000			
	02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	599.566.000			
Klasifikasi Rincian Output	10	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.00	Laporan	818.496.000			
Rincian Output	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000			
	02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000			
	03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	465.689.000			

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

f. DIPA Setditjen PI Revisi ke-8 yang terbit pada tanggal 2 November 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN						
TAHUN ANGGARAN 2021						
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021						
I A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
						Halaman : I A. 2
Klasifikasi Rincian Output	6	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	11.865.00	Rumah Tangga	479.721.627.000
Rincian Output	01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	11865.00	Orang	479.721.627.000
Program	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				191.697.510.000
Kegiatan	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				71.341.555.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP				
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP				
Klasifikasi Rincian Output	1	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	61.010.563.000
Rincian Output	01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI	1,00	Layanan	35.572.240.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI	1,00	layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1,00	1	4.636.080.000
Klasifikasi Rincian Output	2	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.281.601.000
Rincian Output	01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1,00	laporan	404.142.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2,00	laporan	588.077.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1,00	laporan	289.382.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN						
TAHUN ANGGARAN 2021						
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021						
I A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
						Halaman : I A. 3
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						
Layanan						
Klasifikasi Rincian Output	3	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	1.848.190.000
Rincian Output	01	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Anrip	1,00	laporan	391.362.000
	02	EAC.003	Kerumahtanggaan	2,00	laporan	1.456.828.000
Klasifikasi Rincian Output	4	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	2.344.897.000
Rincian Output	01	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	962.461.000
	02	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	1.382.436.000
Klasifikasi Rincian Output	5	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output	01	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output	01	EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output	01	EAG.001	Advokasi Hukum	1,00	Layanan	379.018.000
	02	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	571.124.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN						
TAHUN ANGGARAN 2021						
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021						
I A. INFORMASI KINERJA						
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi : (01) DKI JAKARTA Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
						Halaman : I A. 4
Klasifikasi Rincian Output	8	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1,00	Layanan	100.288.000
	02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2,00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.368.313.000
Rincian Output	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1,00	Layanan	786.532.000
	02	EAI.002	Publikasi	2,00	Layanan	581.781.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	742.719.000
Rincian Output	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1,00	Laporan	212.437.000
	02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1,00	Laporan	119.182.000
	03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1,00	Laporan	411.100.000

g. DIPA Setditjen PI Revisi ke-9 yang terbit pada tanggal 1 Desember 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN									
TAHUN ANGGARAN 2021									
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021									
I A. INFORMASI KINERJA									
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT									
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
Provinsi : (01) DKI JAKARTA									
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
Halaman : I A. 2									
Klasifikasi Rincian Output	6	: 4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		11.865,00	Rumah Tangga		479.721.627.000	
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)		11865,00	Orang		479.721.627.000	
Program	: 033.16.WA	Program Dukungan Manajemen							191.697.510.000
Kegiatan	: 4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							71.341.555.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	: 2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	: 3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	: 4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	: 5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
	: 6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik							
	: 7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP							
	: 8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP							
Klasifikasi Rincian Output	1	: 4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan		61.010.563.000	
Rincian Output	: 01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1,00	Layanan		34.912.420.000	
	: 02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1,00	Layanan		21.462.063.000	
	: 03	EAA.006	Operasionalisasi Kantor Direktorat		1,00	1		4.636.080.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	: 4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan		1.281.601.000	
Rincian Output	: 01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1,00	Laporan		404.142.000	
	: 02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2,00	Laporan		588.077.000	
	: 03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1,00	Laporan		289.382.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN									
TAHUN ANGGARAN 2021									
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021									
I A. INFORMASI KINERJA									
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT									
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
Provinsi : (01) DKI JAKARTA									
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
Halaman : I A. 3									
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal									
Layanan									
Klasifikasi Rincian Output	3	: 4194.EAC	Layanan Umum		3,00	Layanan		1.848.190.000	
Rincian Output	: 01	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Ansp		1,00	Laporan		391.362.000	
	: 02	EAC.003	Kerumahtanggaan		2,00	Laporan		1.456.828.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	: 4194.EAD	Layanan Sarana Internal		2,00	unit		2.344.897.000	
Rincian Output	: 01	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI		1,00	unit		1.010.575.000	
	: 02	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI		1,00	unit		1.334.322.000	
Klasifikasi Rincian Output	5	: 4194.EAE	Layanan Prasarana Internal		1,00	unit		410.000.000	
Rincian Output	: 01	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan		1,00	unit		410.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	6	: 4194.EAF	Layanan SDM		260,00	orang		601.373.000	
Rincian Output	: 01	EAF.001	Pengelolaan Pegawai		260,00	orang		601.373.000	
Klasifikasi Rincian Output	7	: 4194.EAG	Layanan Hukum		3,00	Layanan		950.142.000	
Rincian Output	: 01	EAG.001	Advokasi Hukum		1,00	Layanan		379.019.000	
	: 02	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		2,00	Layanan		571.124.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN									
TAHUN ANGGARAN 2021									
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021									
I A. INFORMASI KINERJA									
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT									
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
Provinsi : (01) DKI JAKARTA									
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
Halaman : I A. 4									
Klasifikasi Rincian Output	8	: 4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		3,00	Layanan		783.757.000	
Rincian Output	: 01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I		1,00	Layanan		170.264.000	
	: 02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi		2,00	Layanan		613.493.000	
Klasifikasi Rincian Output	9	: 4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol		3,00	Layanan		1.368.313.000	
Rincian Output	: 01	EAI.001	Strategi Komunikasi		1,00	Layanan		786.532.000	
	: 02	EAI.002	Publikasi		2,00	Layanan		581.781.000	
Klasifikasi Rincian Output	10	: 4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan		742.719.000	
Rincian Output	: 01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I		1,00	Laporan		212.437.000	
	: 02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II		1,00	Laporan		119.182.000	
	: 03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI		1,00	Laporan		411.100.000	

3) Daftar Sarana dan Prasarana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021

Tabel Rekap Barang BMN Tahun 2021

NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Station Wagon (Avanza)	4
2	Sepeda Motor	1
3	Lemari Besi/Metal	31
4	Lemari Kayu	13
5	Rak Besi	20
6	Rak kayu	7
7	Filing Cabinet Besi	5
8	Laci Box	2
9	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	2
10	CCTV- Camera Control Television System	4
11	Alat Penghancur Kertas	13
12	White Board Electronic	3
13	Laser pointer	6
14	LCD Projector/Infocus	7
15	Softboard	1
16	Acces Control System	3
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	6
18	Meja Kerja Kayu	76
19	Kursi Besi/Metal	123
20	Meja Rapat	34
21	Meja Komputer	1
22	Meja Resepsionis	5
23	Meja Makan Kayu	12
24	Kursi Fiber Glas/Plastik	268
25	Nakas	23
26	Cubical	69
27	Meubelair Lainnya	26
28	Air Cleaner	10
29	Lemari Es	6
30	A.C. Sentral	21
31	A.C. Split	15
32	Kipas Angin	2
33	Exhause Fan	2
34	Oven Listrik	1
35	Kitchen Set	3
36	Televisi	24
37	Sound System	1
38	Wireless	1
39	Mic Conference	1
40	Camera Video	2

NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
41	Dispenser	2
42	Handy Cam	1
43	Voice Recoder	10
44	Tripod Camera	2
45	Lensa Kamera	7
46	Camera Adaptor	1
47	Camera Digital	18
48	Lampu Blitz Kamera	1
49	Camera Conference	7
50	Mesin Jilid	2
51	Mesin Barcode	4
52	Handy Talky (HT)	20
53	Unit Remote Control	6
54	Elektrik Thermometer	3
55	Mini Komputer	4
56	P.C Unit	99
57	Lap Top	3
58	Note Book	22
59	Tablet PC	18
60	Monitor	3
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53
62	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	21
63	Router	2
64	Acces Point	3
65	Network Cable Tester	1
66	Peralatan Jaringan Lainnya	2
67	Portable Air Conditioner (Alat pendingin)	2



Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lantai 2 Wing 2



Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lantai 2 Wing 1



Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3



Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3



Ruang Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
di Lobby Gedung A1 Lantai 1



Atrium Lantai 2



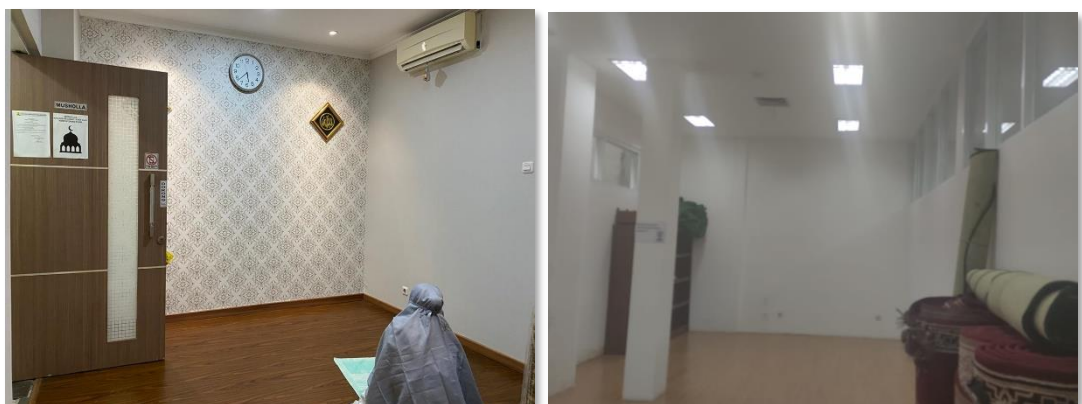
Ruang rapat Lantai 9



Lapangan Gateball Lantai 9



Ruang Laktasi Lantai 2



Musholla
di Gedung A1 dan A2



Toilet
di Gedung A1

Tabel *Time Line* Proses Pelaksanaan Lelang Peralatan Kantor
Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
TA. 2021

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Surat Permohonan Lelang : UM.01.02-SATKER-PI/406 beserta Surat pendukung dan dokumen lainnya	5 Juli 2021
2	Upload Dokumen Permohonan Lelang pada website E lelang (Verval Online)	5 Juli 2021
3	E Tiket Lelang 61Q0Q1	3 Agustus 2021
4	Penyerahan Dokumen Asli Permohonan Lelang (Verval Offline)	3 Agustus 2021
5	Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL Jakarta III Surat Nomor S-1782/WKN.07/KNL.03/2021	16 Agustus 2021
6	Pengumuman Lelang Nomor 01/PNG/SATKER-PI/2021 divalidasi oleh Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	25 Agustus 2021
7	Hasil Pelaksanaan Lelang 73 Unit Peralatan Kantor oleh KPKNL Jakarta III	01 September 2021
8	Risalah Lelang Nomor 447/27/2021 tanggal 1 September 2021	01 September 2021
9	BAST Nomor 101/BAST/SATKER-PI/2021	03 September 2021
10	SK Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 514/KPTS/SATKER-PI/2021 Tentang Penetapan Penghapusan Melalui Lelang/Penjualan BMN Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Peralatan Mesin Yang Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	14 September 2021
11	Penghapusan Barang dari Daftar Barang pada SIMAK BMN berdasarkan SK 514/KPTS/SATKER-PI/2021	14 September 2021

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
12	Surat Kuasa Pengguna Barang Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III Nomor UM.01.02/SATKER-PI/695 hal Peyampaian Laporan Pelaksanaan Penghapusan melalui Lelang Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. (Tembusan ke Pengguna Barang, UAPPBE1, Inspektur IV)	14 September 2021

Table *Time Line* Proses Pelaksanaan Lelang Kendaraan Operasional Kantor (KDO)
Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
TA. 2021

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
Permohonan Lelang Ulang 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Tahap 2		
1	Surat Permohonan Lelang Nomor UM.01.02-SATKER-PI/784	15 Oktober 2021
2	Upload Dokumen Permohonan Lelang pada website E lelang	18-19 Oktober 2021
3	E Tiket Lelang Nomor UXPN2D	21 Oktober 2021
Pelaksanaan Lelang Kendaraan Dinas Operasional 16 Unit (Tahap 1)		
4	Penetapan Jadwal Lelang KPKNL Jakarta III Surat Nomor S-2367/WKN.07/KNL.03/2021	28 Oktober 2021
5	SPT Penghentian Penggunaan	01 November 2021
6	Penetapan Pemenang Lelang	15 November 2021
7	Serah Terima BAST Penjualan 16 Unit KDO	15-22 November 2021
8	Risalah Lelang Nomor 612/27/2021	22 November 2021
9	SK Penghapusan Daftar BMN 16 KDO dari SIMAK BMN Nomor 709/KPTS/SATKER-PI/2021	29 November 2021
Permohonan Lelang Ulang 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Tahap 2		
10	Surat Permohonan Lelang Ulang Nomor UM.01.02-SATKER-PI/944	22 November 2021
11	Upload Dokumen Permohonan Lelang pada website E lelang	23 November 2021
12	E Tiket Lelang Ulang RJXRMZ	26 November 2021
Pelaksanaan Lelang Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit (Tahap 2)		
13	Penetapan Pemenang Oleh KPKNL	20 Desember 2021
14	Serah Terima BAST Penjualan 1 Unit KDO	22 Desember 2021
15	SK Penghapusan Daftar BMN 1 Unit KDO Nomor 785/KPTS/SATKER-PI/2021	28 Desember 2021

Tabel Barang Milik Negara Peralatan Mesin Berupa 17 Unit Kendaraan Dinas Operasional
yang Sudah Terjual Pada Lelang KPKNL Jakarta III
Satuan Kerja Pembiayaan Infrastrukturpekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR

LOT	Tanggal Pelaksanaan Lelang	OBJEK LELANG	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT/ OPEN BIDDING	UANG JAMINAN	NILAI TERJUAL
1.	20-28 Desember 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 NISSAN X-TRAIL ST A/T , NOMOR POLISI B 1762 WQ, WARNA HITAM TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : QR.25.303175A NO RANGKA : T30A31462	Rp 256.750.000,00	Rp 47.354.000,00	Rp23.677.000,00	Rp52.100.000,00
2.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 NISSAN X-TRAIL ST A/T, NOMOR POLISI B 1763 WQ, WARNA HITAM TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : QR.25.303146A NO RANGKA : T30A31543	Rp 256.750.000,00	Rp 43.299.000,00	Rp21.649.500,00	Rp43.350.000,00
3.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 ISUZU PANTHER LS 25, NOMOR POLISI B 8694 ES, WARNA COKLAT MUDA METALIK TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : E274797 NO RANGKA : MHCTBR54F5K274797	Rp 157.500.000,00	Rp 74.196.000,00	Rp37.098.000,00	Rp81.099.999,00
4.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 PANTHER TOURING T25 LG AT, NOMOR POLISI B 8855 ES, WARNA BIRU METALIK TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : E274244 NO RANGKA : MHCTBR54F5K274244	Rp 188.000.000,00	Rp 72.382.000,00	Rp36.191.000,00	Rp92.567.899,00
5.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 PANTHER LS 25, NOMOR POLISI B.8726 ES, WARNA BIRU TUA METALIK TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : E274772 NO RANGKA : MHCTBR54F5K274772	Rp 157.500.000,00	Rp 71.772.000,00	Rp35.886.000,00	Rp81.000.000,00
6.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 PANTHER LS 25, NOMOR POLISI B 8738 ES, WARNA BIRU TUA METALIK TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : E274774 NO RANGKA : MHCTBR54F5K274774	Rp 157.500.000,00	Rp 72.704.000,00	Rp36.352.000,00	Rp80.360.000,00
7.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 PANTHER TOURING UP T25 LG AT, NOMOR POLISI B 8853 ES, WARNA BIRU METALIK TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : E274250 NO RANGKA : MHCTBR54F5K274250	Rp 188.888.888,00	Rp 65.982.000,00	Rp32.991.000,00	Rp88.888.999,00
8.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 PANTHER LM 25, NOMOR POLISI B 2083 DQ, WARNA BIRU TUA METALIK TAHUN PEMBUATAN 2006 NO MESIN : E281028 NO RANGKA : MHCTBR54F6K281028	Rp 147.092.000,00	Rp 50.296.000,00	Rp25.148.000,00	Rp59.555.999,00

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

LOT	Tanggal Pelaksanaan Lelang	OBJEK LELANG	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT/ OPEN BIDDING	UANG JAMINAN	NILAI TERJUAL
9.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 PANTHER LM 25, NOMOR POLISI B.2079 DQ, WARNA BIRU TUA METALIK TAHUN PEMBUATAN 2006 NO MESIN : E281112 NO RANGKA : MHCTBR54F6K281112	Rp 147.092.000,00	Rp 48.961.000,00	Rp24.480.500,00	Rp58.555.999,00
10.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 PANTHER LM 25, NOMOR POLISI B 2074 DQ, WARNA BIRU TUA METALIK TAHUN PEMBUATAN 2006 NO MESIN : E281031 NO RANGKA : MHCTBR54F6K281031	Rp 147.092.000,00	Rp 51.498.000,00	Rp25.749.000,00	Rp58.555.999,00
11.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 4 ISUZU PANTHER LS 25, NOMOR POLISI B 8858 ES, WARNA COKLAT MUDA METALIK TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : E274799 NO RANGKA : MHCTBR54F5K274799	Rp 157.500.000,00	Rp 62.917.000,00	Rp31.458.500,00	Rp88.899.999,00
12.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 2 Supra X 125 R CW, NOMOR POLISI B 6482 SRQ, WARNA HITAM MERAH TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : JB52E1051727 NO RANGKA : MH1JB52195K051827	Rp 13.950.000,00	Rp 2.657.000,00	Rp1.328.500,00	Rp4.100.100,00
13.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 2 Supra X 125 R CW, NOMOR POLISI B 6457 SRQ, WARNA HITAM MERAH TAHUN PEMBUATAN 2005 NO MESIN : JB52E1044419 NO RANGKA : MH1JB52185K044609	Rp 13.950.000,00	Rp 2.931.000,00	Rp1.465.500,00	Rp3.777.777,00
14.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 2 YAMAHA JUPITER MX 1 S7, NOMOR POLISI B 6958 SQA, WARNA MERAH TAHUN PEMBUATAN 2006 NO MESIN : 1S7162333 NO RANGKA : MH31S70016K162232	Rp 12.198.415,00	Rp. 2.127.000,-	Rp1.063.500,00	Rp3.777.777,00
15.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 2 YAMAHA JUPITER MX 1 S7, NOMOR POLISI B 6957 SQA, WARNA MERAH TAHUN PEMBUATAN 2006 NO MESIN : 1S7162282 NO RANGKA : MH31S70016K162201	Rp 12.198.415,00	Rp 2.312.000,00	Rp1.156.000,00	Rp3.825.600,00
16.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 2 YAMAHA JUPITER MX 1 S7, NOMOR POLISI B 6966 SQA, WARNA BIRU TAHUN PEMBUATAN 2006 NO MESIN : 1S7162817 NO RANGKA : MH31S70016K162689	Rp 12.198.415,00	Rp 2.358.000,00	Rp1.179.000,00	Rp4.235.650,00
17.	28 Oktober – 29 November 2021	1 UNIT KENDARAAN RODA 2 YAMAHA JUPITER MX 1 S7, NOMOR POLISI B.6965 SQA, WARNA BIRU TAHUN PEMBUATAN 2006 NO MESIN : 1S7162812 NO RANGKA : MH31S70016K162684	Rp 12.198.415,00	Rp 1.849.000,00	Rp924.500,00	Rp3.333.333,00

4) Foto Dokumentasi Kegiatan Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020

A. Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

a) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Internalisasi Reformasi Birokrasi serta budaya I-Prov di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Grand Zuri BSD City Tangerang, pada tanggal 8 April 2021

b) Pelaksanaan Tata Laksana Organisasi

- Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Royal Pajajaran Hotel Bogor, pada tanggal 4-5 Maret 2021



Pembahasan Butir-butir Kegiatan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Yusro Inn Hotel Bekasi , pada tanggal 22-23 Maret 2021



Usulan JF Analis Pembiayaan di Yusro Inn Hotel Bekasi , pada tanggal 22-23 Maret 2021



Evaluasi Uji Coba Pengisian Kuisioner Uji Bdeban JF Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Sentul Bogor pada tanggal 7-8 Mei 2021

2) Layanan SDM

- Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai
 - Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Pembekalan On The Job Training (OJT) CPNS Kementerian PUPR Formasi Tahun 2019 di Ruang Rapat PUPR Lantai 9, pada tanggal 18 Januari sd 29 Januari 2021



Peningkatan Kompetensi Pegawai Non PNS di Lingkungan DJPI di Ballroom Lantai 9, pada tanggal 13 s/d 16 Agustus 2021



Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Permenpera/RB No.8 Tahun 2021 di Camp Hulu Cai, Bogor, pada tanggal 25 - 26 Oktober 2021

- Bimtek Pengembangan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Pekan Jafung di Jakarta, Aditorium Lantai 2 DJPI pada tanggal 15 Maret 2021

3) Layanan Umum

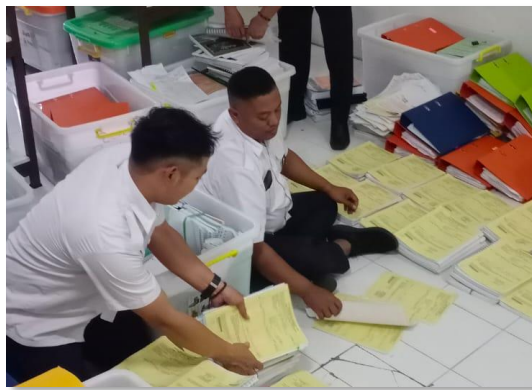
- a) Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip
 - Penatausahaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta Arsip Aktif dan Inaktif Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip dan TNDE di Sentul City, pada tanggal 11 - 12 April 2021



Penataan Arsip di Gedung Arsip Kintaka



Penataan Arsip di Ruang Arsip Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Jakarta

b) Layanan Kerumahtanggaan

- Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

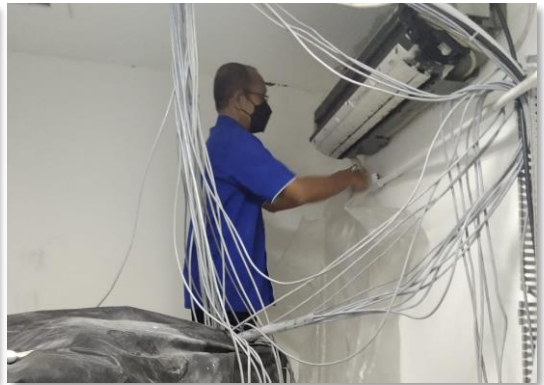


Rangkaian kegiatan Peringatan Hari Bhakti Kementerian PUPR, di Jakarta

- Peningkatan Layanan Kerumahtanggaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Pengamanan ruang kantor oleh Satuan Pengamanan
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Gedung Lantai 2, Jl. Raden Patah 1 No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

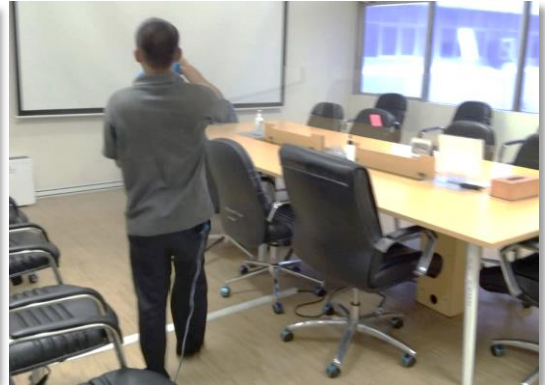
- Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Pelaksanaan Swab antigen setiap hari dan juga PCR saat dibutuhkan,
di Atrium Lantai 2, Jl. Raden Patah 1 No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan



Pemberian Penambah Daya Tahan Tubuh kepada Pegawai



Penyemprotan Disinfektan secara berkala di seluruh ruangan kantor
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

B. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

1) Layanan Hukum

a) Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum

- Pembinaan Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan Tahun 2021



Rapat Koordinasi Sosialisasi penyebaran Informasi hukum bidang perumahan,
di Hotel Rizen Kedaton, Bogor pada tanggal 15 - 17 Februari 2021



Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR no.24 tahun 2020,
di Hotel Sotis Kemang, Jakarta pada tanggal 4 Maret 2021



Rapat Pembahasan Majalah VFM di Hotel Dharmein, pada tanggal Jakarta 24 Juni 2021

b) Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama

- Pembinaan Kerjasama Direktorat Jenderal Pembiayaan Inf. PU dan Perumahan Tahun 2021



FGD Tentang Evaluasi Pelaksanaan Regulasi KPBK Lingkup DJPI
di Hotel Luxton pada tanggal Bandung 21-22 Oktober 2021

c) Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021



Pembuatan Ruang Baca Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
(Pengadaan Langsung), di Atrium Lantai 2 Jl. Raden Patah 1 No. 1, Jakarta Selatan

- Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan Produk Hukum Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2021;



Rapat FGD Pembinaan Produk Hukum Bidang Pembiayaan Perumahan
di Rizen Kedaton Hotel & Resort, Bogor 2 - 4 Juni 2021

- Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;



Rapat FGD Penyempurnaan Konsep PK Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Hotel Rizen Padjajaran , Bogor pada tanggal 22 April 2021

2) Layanan Kehumasan dan Protokoler

- a) Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021



Rapat Pembahasan Pengaduan Masyarakat
di Hotel Qubika Boutique, Tangerang pada tanggal 9 April 2021



Rapat Pembahasan Pengaduan Masyarakat di Hotel Qubika Boutique, Tangerang
pada tanggal 10-11 Mei 2021

- Layanan Kehumasan Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2021



Rapat Koordinasi kegiatan fasilitasi pelayanan masyarakat di Hotel Dharmein, Jakarta 15 Januari 2021
pada tanggal Hotel Dharmein, Jakarta 15 Januari 2021



Sosialisasi penyusunan peraturan perundang-Undangan bidang PI
di Hotel Sotis Kemang, , Jakarta pada tanggal 4 Maret 2021



FGD Pengenalan Tugas dan Fungsi Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan
Perumahan Selaku anggota Forum Konsultasi PPID
di Hotel Rizen Kedaton, pada tanggal Bogor 20 Mei 2021



Digitalisasi Booth (Pengadaan Langsung),
di Jakarta, 22 Maret 2021

- b) Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi
- Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021



Rapat Pembahasan Majalah VFM
di Hotel Dharmein, Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021



Pembuatan Video Greeting (Pengadaan Langsung)
Di Jakarta, pada tanggal 4 Mei 2021

- Dokumentasi Pimpinan dan Penyebaran Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik



Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak (Pengadaan Langsung)
di Sinar Pagi Baru, Jakarta 3 Mei 2021 dan Sinar Pagi Baru, Jakarta 10 Mei 2021

C. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 - Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA.2022

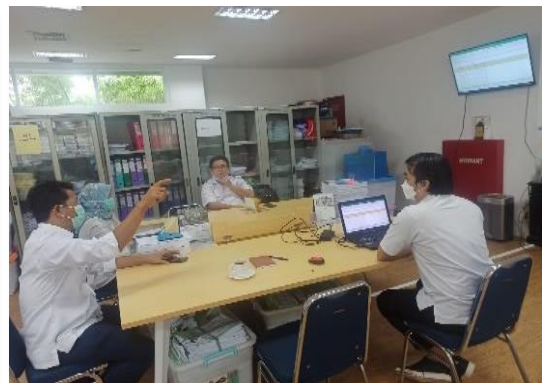


Penelitian dan Reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2022
di Swiss-Bellhotel BSD-Tangerang Selatan, pada tanggal 20 s.d. 24 September 2021

- b) Pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan
 - Penyusunan Pengelolaan Administrasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2021



Revisi DIPA Ke-1 (Satu) Kewenangan DJA, dan POK Revisi 1 (Satu) dan POK Revisi 2 (Dua)
Zoom Meeting, 14 Februari 2021



Revisi DIPA Ke-2 (Dua) Kewenangan DJA, POK Revisi 1 (Satu), POK Revisi 2 (Dua) POK Revisi 3 (Tiga) dan POK Revisi 4 (Empat)
Zoom Meeting, 15 April 2021

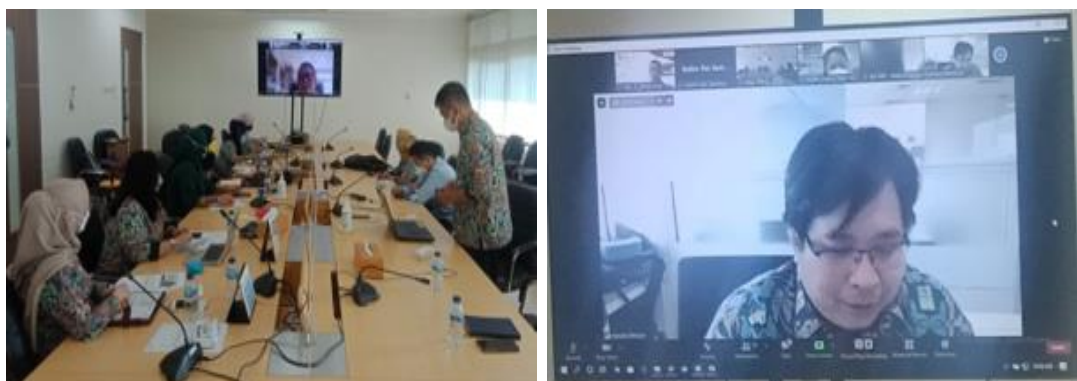
- Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Sosialisasi dan Pendampingan Penyampaian SPT PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 (Gedung A1), 5 Maret 2021



Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I dan Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021 di Hotel Santika Premiere Bintaro, pada tanggal 20 April 2021



Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI, pada tanggal 27 Oktober 2021



Sharing Session Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 (Gedung A1), pada tanggal 28 - 29 September 2021



Sinkronisasi Data pada Aplikasi Tunjangan Kinerja
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI, 27 Oktober 2021

c) Penatausahaan dan Pelaporan BMN

- Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Rapat Koordinasi Persiapan Penghapusan BMN
di Ruang Rapat 1, Gedung A1 Lantai 2 wing 3, DJPI, Jakarta. pada tanggal 9 Maret 2021



Penyampaian Permintaan Dokumen Lampiran Pendukung PSP BMN T.A. 2021 dan Koordinasi terkait Penghapusan BMN
di Gedung KPKNL Jakarta III Jl. Prajurit KKO Usman, Senen, Jakarta Pusat.
pada tanggal 9 April 2021



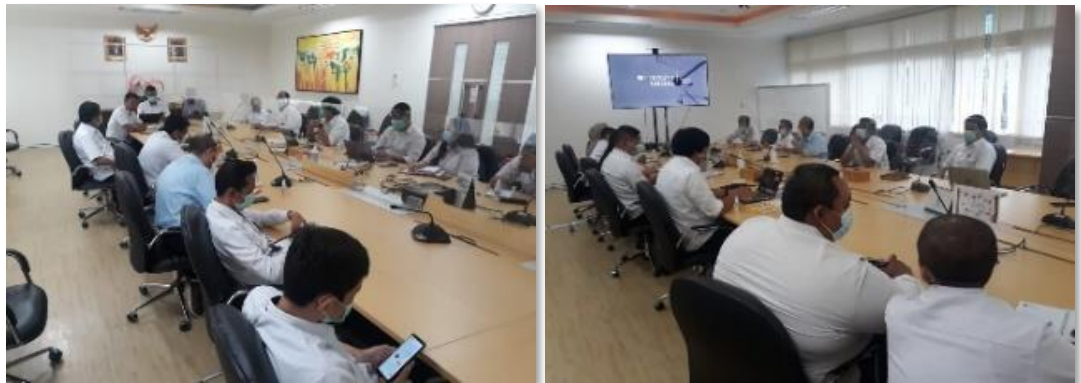
Membahas Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian PUPR (Keputusan Menteri Keuangan no.71/KU.6?WKN.07/KNL03/2021 di Gedung KPKNL Jakarta III
Jl. Prajurit KKO Usman, Senen, Jakarta Pusat.
Tanggal , 27 April 2021



Rapat Koordinasi Kesepakatan Nilai Limit BMN yang akan dilakukan Penghapusan, Penjualan/Pelelangan
di Ruang Rapat 1, Gedung A1 Lantai 2 wing 3, DJPI, Jakarta.
Pada tanggal, 29 April 2021



Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional di Satuan Kerja Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat, Gedung A1 Lantai 2 wing 1, DJPI, Jakarta.
Pada tanggal 16 Juni 2021



Rapat Tahap Awal Inventarisasi BMN T.A. 2021 dengan Helpdesk Barcoding BMN di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat 1, Gedung A1 Lantai 2 wing 3, DJPI, Jakarta.
Pada tanggal , 13 April 2021



Aanwijzing KDO Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Area parkir DJPI Jakarta.

2) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

a) Penyusunan Laporan Keuangan

- Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan LK dan LBMN (Unaudited) TA.2020
di Ruang rapat 1 Lantai 2 Wing 3, pada Tanggal 27-29 Januari 2021



Rapat Koordinasi Tim Sekretariat Satgas SPIP
Kementerian PUPR
di Ruang Rapat Setditjen, pada tanggal 5 Maret 2021



Rapat Evaluasi dan Pendampingan atas Penyusunan Manajemen Resiko
di Ruang Rapat Lt 9, pada tanggal 24-25 Maret 2021



Rapat Koordinasi Tim Satgas SPIP di Ruang Rapat Lt 9, pada tanggal 16 Maret 2021



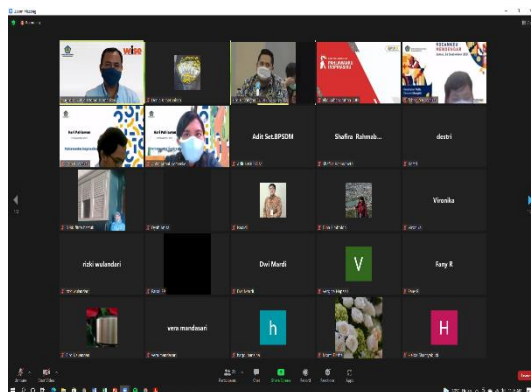
Rapat Pembahasan Tanggapan LHP BPK RI di Ruang Rapat 1, tanggal 19 April 2021



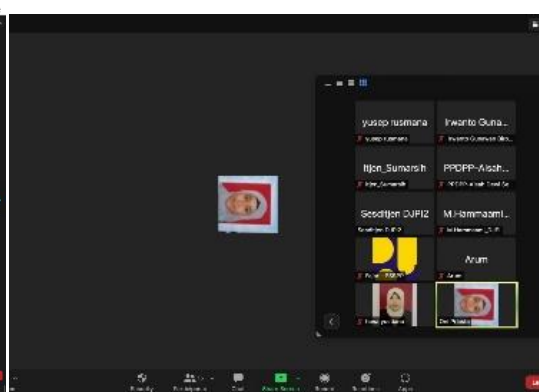
Rapat Pembahasan Tanggapan LHP BPK RI di Ruang Rapat 1, pada tanggal 27 Mei 2021



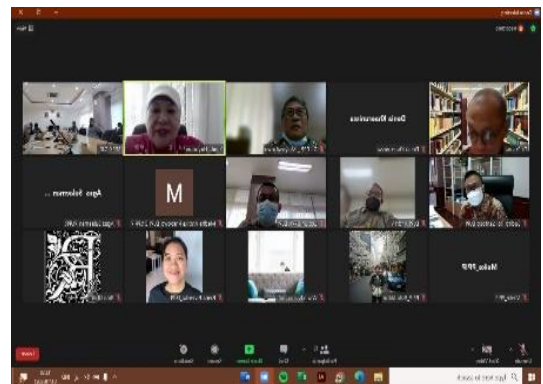
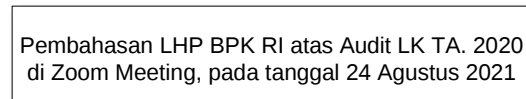
Rapat Penyusunan UPR T1 di Ruang Rapat 1, pada tanggal 11 Mei 2021



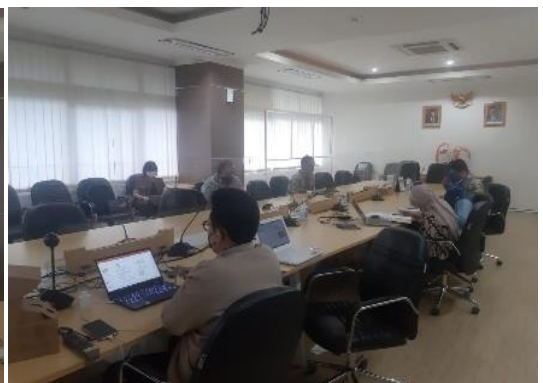
Rapat Pematangan UPR T1
Zoom Meeting, pada tanggal 22 Juni 2021



Rapat Pematangan UPR T1, Zoom Meeting,
pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2021



Rapat Pembahasan Awal Penilaian Mandiri Maturitas 2021
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 dan zoom meeting, Tanggal 01 Oktober 2021



FGD Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
di Ruang Rapat 1Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 07 Oktober 2021



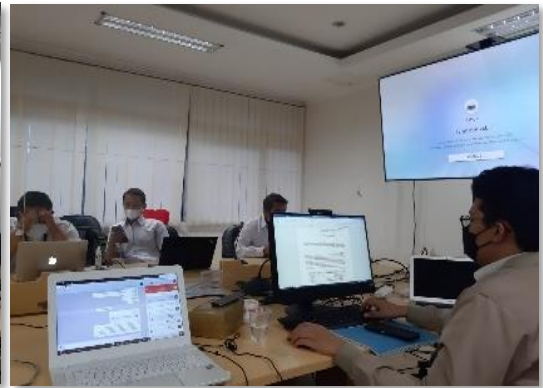
Rapat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021
Di Ruang Rapat 1 dan 2 Lantai 2 Wing 3, Tanggal 11-15 Oktober 2021



Rapat Pembahasan LHP BPK RI pada Satker BLU PPDPP
di Ruang Rapat Dirjen, pada tanggal 12 Oktober 2021



Rapat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021
di Aviary Hotel Bintaro, Tanggal 16-17 Oktober 2021



Rapat Lanjutan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, Tanggal 18-19 Oktober 2021 pada tanggal



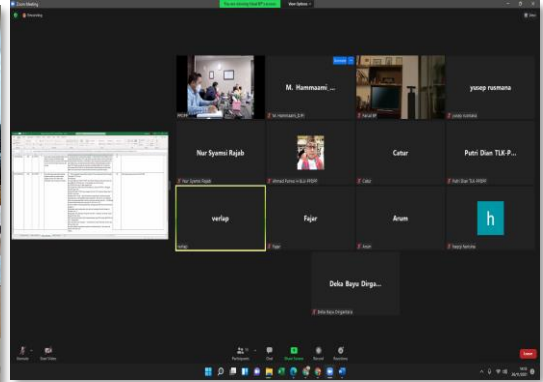
Rapat Pembahasan LHP BPK RI pada Satker BLU PPDPP
Zoom Meeting, pada tanggal 21 Oktober 2021



Rapat Konsinyasi Pembahasan Percepatan Laporan Hasil Temuan BLU PPDPP
di Ruang Rapat Dirjen, pada tanggal 04 November 2021



Rapat Konsinyasi Pembahasan Laporan Hasil Temuan Inspektorat Jenderal
di Ruang Rapat Dirjen, pada tanggal 5 November 2021



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, BPKP dan Itjen
di Ruang Rapat 1 dan Zoom Meeting, pada tanggal 23, 24 dan 26 November 2021

b) Penyusunan Laporan Kinerja

- Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2021



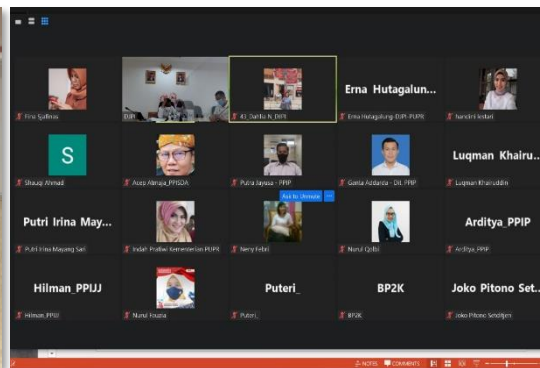
Sinkronisasi Data Untuk Kebutuhan Penyusunan Lakin Setditjen PI TA.2021
di Ruang Rapat Setditjen PI pada tanggal 28 Oktober 2021

c) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR



Rapat Evaluasi Kinerja DJPI Triwulan 1 dan Strategi Persiapan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA. 2021
di Gedung ATR/BPN ex Kemenpera Lantai 9, pada tanggal 29 April 2021



Pembahasan Tindak Lanjut Prognosis DJPI TA 2021
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 30 September 2021



Pembahasan Progres Pelaksanaan Prognosis DJPI TA 2021
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 4 Oktober 2021



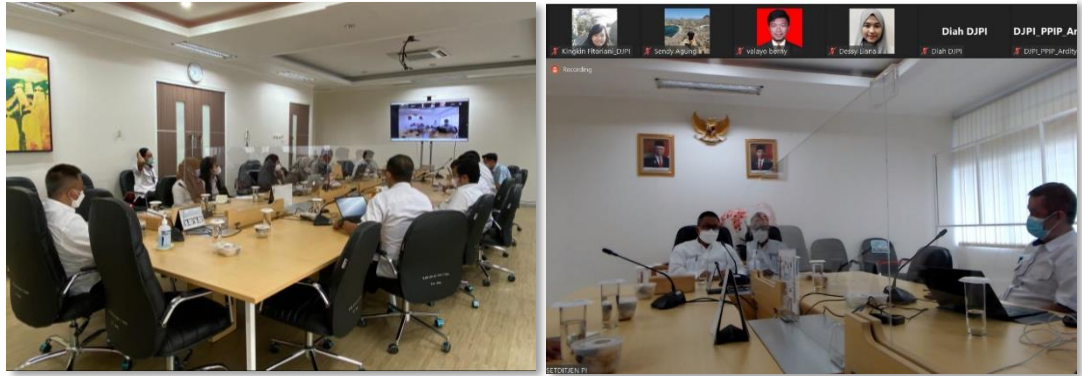
Pembahasan Progres Pelaksanaan Prognosis DJPI TA 2021
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 5 Oktober 2021



Pembahasan Progres Pelaksanaan Prognosis DJPI TA 2021
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 11 Oktober 2021



Pembahasan Progres Pelaksanaan Prognosis DJPI TA 2021
di Ruang Rapat 1 DJPI Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 18 Oktober 2021



Pembahasan Progres Pelaksanaan Prognosis DJPI TA 2021
di Ruang Rapat 1 DJPI Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 25 Oktober 2021



Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Paket Kegiatan Krusial Menjelang Akhir TA. 2021
di Ruang Rapat 1 DJPI Lantai 2 Wing 3, pada tanggal 16 November 2021



Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA. 2021 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran
TA.2022 di Lingkungan Setditjen PI di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI
pada tanggal 6 Desember 2021



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan